

**STRATEGI PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS DAN
CENTER ADVOKASI (PERPENCA) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

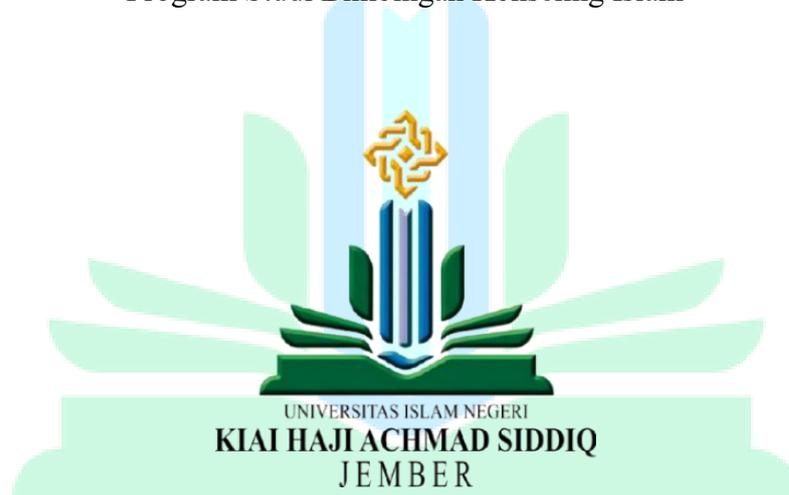
Manda Rosa Yanti
NIM: 211103030009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
2025**

**STRATEGI PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS DAN
CENTER ADVOKASI (PERPENCA) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Manda Rosa Yanti
NIM: 211103030009
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
2025**

**STRATEGI PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS DAN
CENTER ADVOKASI (PERPENCA) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

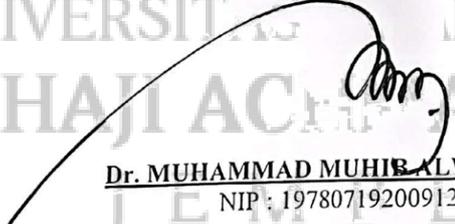
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh :

Manda Rosa Yanti
NIM: 211103030009

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Dr. MUHAMMAD MUHIB ALWI, S.Psi., M.A.
NIP. : 197807192009121005

**STRATEGI PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS DAN
CENTER ADVOKASI (PERPENCA) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



(Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M.)
NIP. 19711123199703 1 003



(Nasirudin Al Ahsani, M.Ag.)
NIP. 19900212 201903 1 006

Anggota:

1. Dr. Moh. Mahfudz Faqih, S.Pd., M.Si

2. Dr. Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Dakwah



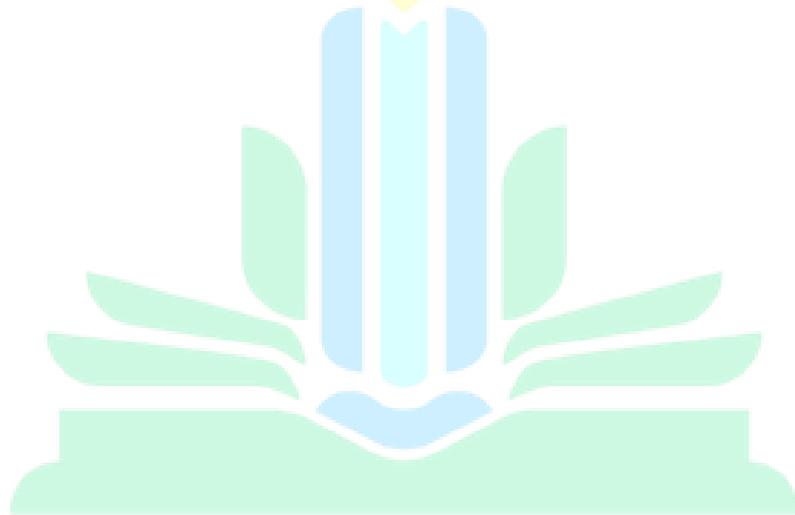

(Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.)
NIP. 19730227 200003 1 001

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka
adalah sebaik-baik makhluk”

(QS. Al-Bayyinah: 7)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

n.d.) * Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: DKU Print,

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memberikan kelapangan, kekuatan, semangat, dan ketekunan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya, Bapak Surono dan Ibu Sumiati. Mereka adalah sosok yang selalu berada di sisi saya tidak peduli apapun keadaannya. Saya bisa menempuh pendidikan dan berdiri hingga saat ini tidak lain karena rasa cinta dan kasih sayang kedua orang tua saya. Segala bentuk dukungan dan doa sudah mereka berikan kepada saya. Tidak terhitung berapa ribu terima kasih yang harus saya sampaikan kepada mereka, dan keberuntungan akan selalu menjadi satu kata yang terlintas dalam benak saya karena terlahir menjadi anak Bapak dan Ibu. Kebahagiaan Bapak dan Ibu akan selalu menjadi tujuan dan motivasiku dalam menjalani hidup. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu.
2. Kakak-kakakku tersayang, Mulyadi Priyandoko dan Mulyanan Setio Rahmayanti yang selalu memberikan dukungan kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Para sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih sudah menemani saya di setiap momen dalam hidup ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan dalam menyusun skripsi yang berjudul “Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kemudian sholawat selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jaman yang terang benderang.

Penulis dapat mencapai tahap ini atas bantuan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Ardiansyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing akademik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas.
7. Segenap pengurus dan anggota PERPENCA Jember yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.
8. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun di setiap momen penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini belum sempurna dan masih mengandung sejumlah kelemahan yang perlu disempurnakan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diperlukan dari semua pihak. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, serta semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Jember, 19 Mei 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Manda Rosa Yanti, 2025: *Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: *Strategi, Kesejahteraan sosial, Penyandang disabilitas.*

Kondisi kesejahteraan penyandang disabilitas yang ideal ialah harus mencakup dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam memenuhi hak-hak dasar, aksesibilitas, dan kesempatan setara dalam berbagai bidang kehidupan. Namun pada kenyataannya, sebagai individu yang memiliki hambatan pada fungsi tubuhnya membuat lingkungan penyandang disabilitas berada cenderung tidak mendukung aktualisasi dari potensi yang mereka punya. Perpenca sebagai komunitas penyandang disabilitas terbesar di Kabupaten Jember memiliki visi yang salah satunya adalah tercapainya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini akan mendeskripsikan strategi Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk hambatan pemenuhan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana strategi Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bentuk hambatan pemenuhan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. 2. Untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Hambatan pemenuhan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember adalah masih adanya stigma negatif di masyarakat terhadap penyandang disabilitas, kurangnya dukungan dan penerimaan keluarga, *self-esteem* penyandang disabilitas cenderung rendah, SDM penyandang disabilitas masih rendah, dan kurangnya kesadaran masyarakat maupun pemerintah terhadap hak-hak penyandang disabilitas. 2. Strategi Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember adalah diawali dengan *need assessment*, mengupayakan peningkatan potensi sumber daya dan sumber dana, membina keakraban dan kekeluargaan antar anggota penyandang disabilitas, serta memperjuangkan lingkungan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subyek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Gambaran Objek Penelitian.....	50
B. Penyajian dan Analisis Data.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.2 Istilah Penyebutan Penyandang Disabilitas	37



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di suatu negara tentunya akan mendapatkan jaminan berupa hak-hak yang bisa didapat sebagai seorang warga negara. Seorang warga negara ini dapat didefinisikan sebagai anggota negara yang memiliki kedudukan khusus di negaranya serta memiliki hubungan antara hak dan kewajiban yang timbal balik dengan negaranya.¹ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa seorang warga negara yang sah diakui secara hukum akan memiliki hak-hak dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hak-hak dasar warga negara yang dimaksud di atas telah diatur dalam UUD Tahun 1945 yang meliputi hak kebebasan beragama, berkumpul dan berserikat, hak perlindungan dan pengakuan, hak kepastian hukum yang adil, hak bekerja dan perlakuan yang adil, serta hak atas status kewarganegaraan.² Diantara beberapa hak tersebut tentunya pembahasan terkait hak dan jaminan kesejahteraan sosial dari masing-masing individu juga menjadi suatu hal yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hak kesejahteraan sosial bagi warga negara mencakup hak untuk mendapatkan kondisi yang mendukung pemenuhan kebutuhan material,

¹ Dede Rosyadi, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003). hal. 74

² Annisa, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD 1945," fahum.ac.id, 2023, bit.ly/3ApadBo.

spiritual, dan sosial mereka. Dengan ini, warga negara diharapkan dapat menjalani kehidupan yang layak, mengembangkan diri, serta menjalankan peran sosialnya secara optimal.³ Setiap individu di muka bumi ini menginginkan kehidupan yang sejahtera, baik yang bermukim di perkotaan maupun di pedesaan, mencakup kesejahteraan secara fisik maupun batiniah. Kesejahteraan tersebut mencakup aspek sosial, material, dan spiritual yang ditandai dengan adanya rasa aman, moralitas yang baik, serta ketenangan batin. Setiap warga negara memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial secara maksimal, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat.⁴

Pembahasan kesejahteraan sosial yang didapat dari *Pre-Conference Working for the 15th International Conference of Sosial Welfare*, menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah semua upaya sosial yang terstruktur dan bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai konteks sosialnya. Langkah ini meliputi beragam kebijakan dan layanan yang mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk pendapatan, perlindungan sosial, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, kegiatan budaya, dan aspek-aspek lainnya.⁵ Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial dijalankan dengan landasan filosofi bahwa hidup sejahtera merupakan hak yang melekat pada

³ “UU RI No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” jdih.kemenkeu.go.id, accessed November 1, 2024, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.htm>.

⁴ Dahlia Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Journal of Qur’an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2020): 2.

⁵ Waryono Abdul Ghofur, “Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *HIKMAH* VII, no. 1 (2011): 111.

setiap warga negara, atau dikenal sebagai *welfare of all*.⁶ Berdasarkan filosofi ini, maka seluruh warga negara di Indonesia dengan tanpa memandang perbedaan yang ada memiliki hak dalam memperoleh kesejahteraan yang sama, begitupun dengan para penyandang disabilitas yang ada di negara ini.

Penyandang disabilitas merupakan sebuah sebutan untuk setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu panjang, yang dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak yang setara.⁷ Penyandang disabilitas sejatinya tidak berbeda secara signifikan dari masyarakat pada umumnya. Selain memiliki keterbatasan khusus pada salah satu atau lebih dari fungsi tubuhnya, penyandang disabilitas ini memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat normal lainnya di dalam sebuah negara. Dengan kedudukan yang setara tersebut berarti bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak dalam terjaminnya kesejahteraan sosial di hidupnya. Bab tentang kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ini telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2019, yang mana sebuah kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas yang dimaksud ini mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

⁶ Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Journal of Qur'an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2020): 3.

⁷ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*, 2021. hal. 9

Idealnya, kondisi kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas harus mencakup dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam memenuhi hak-hak dasar, aksesibilitas, dan kesempatan setara dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, penyandang disabilitas dapat mencapai kondisi kesejahteraan sosial yang ideal ketika mereka dapat hidup dengan aman, mandiri, dan dihargai di masyarakat, dengan akses penuh terhadap hak-hak dasar dan kesempatan yang setara di berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas, pendidikan yang inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan, serta kesempatan kerja yang adil dan ramah disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas harus memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik tanpa hambatan fisik maupun diskriminasi.⁸

Abraham Maslow yang dikutip dalam Dede (2015), menyebutkan dalam teori hirarki kebutuhan, bahwa manusia memiliki lima lapisan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya untuk mencapai puncak kebutuhan tertinggi berupa aktualisasi diri dan kesejahteraan hidup. Menurut Maslow, kesejahteraan sosial diawali dengan pemenuhan kebutuhan fisiologis yang mencakup makanan, air, dan tempat tinggal sebagai dasar dari kesejahteraan. Setelah itu, kebutuhan akan rasa aman menjadi penting, mencakup stabilitas dalam pekerjaan, lingkungan yang

⁸ Erlin Sudarwati, "Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan Dan Tni," Kemhan.go.id, 2016, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html#:~:text=Upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian,dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.>

aman, serta perlindungan hukum yang memberikan rasa ketenangan dan perlindungan bagi individu. Selanjutnya, kebutuhan sosial atau rasa memiliki juga berperan dalam kesejahteraan, di mana individu perlu merasakan ikatan sosial, dukungan, dan rasa diterima dalam lingkungan sosialnya. Pada tingkat yang lebih tinggi, kebutuhan akan penghargaan menjadi penting, di mana individu ingin diakui, dihargai, dan memiliki harga diri yang kuat. Terakhir, pada puncak hierarki, adalah aktualisasi diri, yaitu kondisi di mana individu dapat mengembangkan potensi penuh, merasa berkontribusi, dan menjalani hidup yang bermakna.⁹ Dalam konteks kesejahteraan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar bukan satu-satunya indikator tercapainya sebuah kesejahteraan, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial yang memungkinkan individu mencapai keseimbangan hidup yang optimal dan produktif. Itu berarti bahwa dalam upaya mencapai kondisi kesejahteraan sosial yang baik, dukungan orang sekitar dan penerimaan diri dalam lingkungan masyarakat juga menjadi hal yang cukup berpengaruh dalam terciptanya kondisi sosial yang sejahtera.

Sebagai individu yang mengalami perbedaan akibat keterbatasan pada satu atau lebih fungsi tubuhnya, kelompok penyandang disabilitas seringkali menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh lingkungan fisik dan sosial yang kurang inklusif. Dengan kata lain, lingkungan sekitar penyandang disabilitas cenderung tidak mendukung mereka untuk

⁹ Dede Rahmat Hidayat, *Teori Dan Aplikasi Psikologi Kepribadian Dalam Konseling*, ed. Zaenudin A. Naufal, Cet. 2 (Bogor, 2015). 197-200

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.¹⁰ Adanya diskriminasi dari lingkungan yang tidak inklusif tersebut membuat para penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai kesejahteraan sosial yang setara dengan masyarakat pada umumnya. Hambatan ini meliputi akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta fasilitas umum yang ramah disabilitas.

Suharto dan Jihaini dalam penelitiannya menyebutkan bahwa permasalahan terkait kesejahteraan sosial masih kerap dialami oleh para penyandang disabilitas di Indonesia. Permasalahan terkait hal ini, diantaranya adalah masih terbatasnya informasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga para penyandang disabilitas ini masih belum sepenuhnya merasakan manfaat secara maksimal terkait kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas menyebabkan pemahaman yang terbatas di kalangan pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, terhadap kebutuhan dan hak-hak yang wajib dipenuhi bagi penyandang disabilitas. Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya alat-alat pendukung yang dimiliki oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, seperti penyediaan kursi roda, alat bantu dengar, tongkat bagi tunanetra, dan berbagai perangkat pendukung lainnya. Sebagai akibatnya, proses pendistribusian alat bantu bagi penyandang disabilitas berjalan dengan lambat.

¹⁰ Sy. Nurul Syobah, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur," *Nuansa* 15, no. 2 (2018): 252.

Situasi ini banyak dikeluhkan oleh penyandang disabilitas karena mereka harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan alat bantu tersebut.¹¹

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga masyarakat untuk memperbaiki kondisi ini. Namun peran pemerintah saja tidak cukup efektif untuk menjamin kualitas hidup penyandang disabilitas menjadi kondisi yang sejahtera seutuhnya. Lingkungan yang mendukung dan adanya berbagai lembaga maupun komunitas peduli disabilitas di masyarakat tentunya juga memiliki peran penting sebagai pendukung pemerintah dalam upaya mensejahterakan para penyandang disabilitas.

Islam dan Sudibyo dalam penelitiannya menyampaikan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan oleh suatu komunitas peduli difabel dalam memperbaiki kondisi kehidupan para disabilitas adalah dengan melakukan program pemberdayaan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam memberdayakan para penyandang disabilitas dapat menggunakan metode *social capital* atau jaringan sosial dengan tiga tahapan kegiatan, diantaranya penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, serta tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Penelitian ini

¹¹ Suharto and Reni Jifhani, "Implementasi Kebijakan Dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022," *Spektrum* 21, no. 1 (2024): 71–72.

menyebutkan bahwa adanya *social capital* atau jaringan sosial memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.¹²

Salah satu organisasi yang memiliki peranan penting dalam advokasi serta pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember adalah Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA). PERPENCA berperan sebagai organisasi yang memberikan dukungan, advokasi, dan program-program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dengan tujuan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan sosial mereka. Keberadaan Perpenca di tengah permasalahan akan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember nyatanya turut memberikan perubahan positif pada kondisi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara awal peneliti dengan ketua PERPENCA Jember yang menyebutkan bahwa kondisi para disabilitas di Kabupaten Jember saat ini mengalami peningkatan yang ditandai dengan semakin banyaknya disabilitas yang peduli dan memperjuangkan pendidikan, jaminan kesehatan penyandang disabilitas yang hampir 70% tercover BPJS, serta adanya regulasi khusus yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, yang mana itu juga merupakan hasil dari advokasi yang dilakukan Perpenca kepada pemerintah daerah.¹³ Akan tetapi berdasarkan data yang dilakukan penulis dengan

¹² Hafsoh Labibatul Islam and Desiderius Priyo Sudiby, "Social Capital Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri Di Kabupaten Tegal," *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 3, no. 1 (2023).

¹³ Hasil wawancara peneliti kepada ketua PERPENCA Jember, 29 Oktober 2024

wawancara dan observasi kepada beberapa informan menunjukkan bahwa implementasi dari adanya regulasi tersebut juga belum optimal. Masih ditemukan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yang mengalami tantangan dalam mengakses hak-hak dasar mereka, seperti sulitnya para disabilitas khususnya yang berada di daerah jauh dari perkotaan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, maupun kesehatan.

PERPENCA yang merupakan komunitas persatuan bagi berbagai penyandang disabilitas di Kabupaten Jember dan memiliki 4 visi yang salah satunya terkait kesejahteraan, tentunya memiliki tugas yang ekstra dalam memastikan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember memiliki kondisi kehidupan yang sejahtera seutuhnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi menarik dilakukan untuk mengetahui lebih dalam terkait bagaimana strategi PERPENCA dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

Apabila mengacu pada konteks penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hambatan pemenuhan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana strategi PERPENCA dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk hambatan pemenuhan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.
2. Mendeskripsikan strategi yang dilakukan PERPENCA dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan atau pengetahuan yang berkaitan dengan pemberdayaan maupun strategi peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi literatur bagi mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam, terutama bagi mereka yang meneliti upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai strategi peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

- b. Bagi Perpenca Jember, diharapkan penelitian ini dapat berguna membantu Perpenca dalam memperkuat program yang dirancang untuk mengadvokasi hak-hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
- c. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat memberikan cara pandang baru masyarakat umum terhadap keberadaan penyandang disabilitas, serta mengurangi berbagai perlakuan diskriminatif yang selama ini menjadi hambatan bagi para penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah pada penelitian ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan penafsiran pada judul “Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember” berikut uraian singkat beberapa istilah dalam judul yang dimaksud:

- a. Strategi

Strategi adalah istilah yang memiliki makna luas dan dapat diartikan sebagai rencana sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "strategi" diartikan sebagai rencana yang dirancang secara teliti terkait serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada judul penelitian ini, istilah strategi digunakan secara terikat dengan kata sesudahnya, yaitu istilah PERPENCA. Sehingga, yang dimaksud strategi pada penelitian ini ialah perencanaan PERPENCA dalam

mencapai visi yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

b. Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA)

PERPENCA yang merupakan singkatan dari Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi merupakan sebuah komunitas bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, dan merupakan lokasi penelitian yang akan diteliti karena salah satu visinya mengangkat tentang kesejahteraan penyandang disabilitas.

c. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi di mana kebutuhan materi, spiritual, dan sosial setiap warga negara terpenuhi, sehingga mereka mampu hidup secara layak, mengembangkan kemampuan diri, serta menjalankan peran sosialnya.. Sehingga kesejahteraan sosial yang dimaksud di sini adalah terkait kondisi terpenuhinya hak-hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

d. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar serta mengalami pembatasan dalam melaksanakan aktivitas atau tugas sehari-hari. Dalam penelitian ini, penyandang disabilitas merupakan

subyek yang akan diteliti, terutama untuk para penyandang disabilitas yang terdata sebagai anggota PERPENCA Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian mengenai alur penyusunan skripsi yang mencakup penjabaran isi dari setiap bab, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Berikut akan diuraikan sistematika pembahasan penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, berisi bagian-bagian yang membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah-istilah yang ada dalam penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta bagian kajian teori yang memiliki hubungan dengan strategi peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

BAB III Metode Penelitian, berisi bagian-bagian tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan tentang lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, merupakan bab yang menguraikan hasil-hasil yang didapat selama penelitian dilaksanakan. Hasil data akan disajikan dalam penyajian data, lalu dianalisis dan dibahas temuannya dalam pembahasan temuan.

BAB V Penutup, bagian ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan membahas tentang saran-saran bagi pihak yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan acuan atau perbandingan yang relevan. Selain itu juga memiliki tujuan untuk menghindari asumsi bahwa penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menyertakan temuan-temuan dari studi-studi sebelumnya sebagai tambahan informasi. Di bawah ini adalah perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya:

1. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bitung Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016” dilakukan oleh Febiola Zildjan Sururama, Marnan A. T. Mokorimban, dan Prisilia F. Worung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Bitung serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama proses tersebut berlangsung. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan cara pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bitung telah menjalankan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan baik.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa program yang belum bisa dijalankan dengan efektif karena munculnya hambatan selama prosesnya.¹⁴

2. “Tindakan Sosial Komunitas Kreatif Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Komunitas Kreatif Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan)” dilakukan oleh Jihan Dzulhijjah yang bertujuan untuk memahami tindakan sosial komunitas kreatif disabilitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial pada komunitas kreatif disabilitas Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan strategi studi kasus, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara terhadap 9 informan, dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hal yang melatar belakangi adanya tindakan sosial pada komunitas kreatif disabilitas adalah karena adanya kesenjangan dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, lalu pembinaan dalam mengembangkan potensi keterampilan para penyandang disabilitas, dan terakhir mewadahi usaha para penyandang disabilitas agar lebih terarah dan mandiri. Bentuk tindakan sosial komunitas kreatif disabilitas yaitu adanya motif tindakan

¹⁴ Febiola Zildjian Sururama, Marnan A. T. Mokorimban, and Prisilia F. Worung, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bitung Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* VII, no. 5 (2016).

terhadap penyandang disabilitas dengan melakukan kegiatan yang bersifat berkelanjutan (instrumental rasionalitas sarana-tujuan).¹⁵

3. “Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Dalam Mensosialisasikan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember” dilakukan oleh Fatimatus Zahroh dengan tujuan untuk mengetahui strategi PERPENCA dalam mensosialisasikan kesamaan kesempatan kerja para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi PERPENCA dalam mengkampanyekan kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember meliputi program kesetaraan (A, B, dan C), program sarjana di UNIPAR Jember, serta pelatihan kerja.¹⁶
4. “Implementasi Kebijakan Dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022” dilakukan oleh Suharto dan Reni Jifhani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan

¹⁵ Jihan Dzulhijjah, “Tindakan Sosial Komunitas Kreatif Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Komunitas Kreatif Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan)” (Universitas Sriwijaya, 2022).

¹⁶ fatimatus Zahroh, “Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas Dan Center Advokasi (Perpenca) Dalam Mensosialisasikan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

pemenuhan hak kesejahteraan sosial di Desa Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sementara data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Desa Rowosari sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala. Di antaranya adalah komunikasi yang belum menyeluruh kepada masyarakat, pemerataan sosialisasi yang kurang dari pihak pelaksana, keterbatasan tenaga pengajar dan wawasan terkait teknologi informasi, kurangnya alat bantu seperti kursi roda dan alat transportasi, bangunan yang belum ramah difabel, serta ketiadaan fasilitas belajar khusus bagi penyandang disabilitas di Desa Rowosari.¹⁷

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Febiola Zildjan Sururama, Marnan A. T. Mokorimban, dan Prisilia F. Worung. 2016.	Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bitung Ditinjau Dari	- Sama-sama membahas terkait kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.	- Pada penelitian terdahulu ini berfokus pada pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas jika

¹⁷ Suharto and Jifhani, "Implementasi Kebijakan Dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022."

		Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.		ditinjau dari UU No. 8 Tahun 2016, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus pada strategi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
2.	Jihan Dzulhijjah (2022).	Tindakan Sosial Komunitas Kreatif Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Komunitas Kreatif Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan).	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas terkait kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. - Menggunakan metode penelitian kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu ini fokus pada hal yang melatarbelakangi adanya tindakan sosial pada komunitas kreatif disabilitas di Sumatera Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada strategi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Jember.
3.	Fatimatus Zahroh (2023).	Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Dalam Mensosialisasikan Kesamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki subyek penelitian yang sama, yaitu PERPENCA Jember. - Menggunakan pendekatan kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu ini lebih terfokus pada strategi mensosialisasikan kesetaraan kerja bagi penyandang disabilitas, sedangkan penelitian yang

		Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.		dilakukan oleh penulis terfokus pada strategi peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
4.	Suharto dan Reni Jifhani. (2024).	Implementasi Kebijakan Dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas terkait isu kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. - Menggunakan metode kualitatif. 	- Pada penelitian terdahulu ini fokus pada implementasi kebijakan pemenuhan hak kesejahteraan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Semarang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada strategi peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas oleh komunitas difabel di Jember.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dicantumkan di atas, maka dapat diketahui bahwa beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada implementasi pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2016, sedangkan untuk penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu lebih berfokus pada strategi komunitas disabilitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

B. Kajian Teori

1. Strategi

1) Pengertian Strategi

Istilah strategi telah menjadi kata yang umum digunakan masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna, seperti rencana, taktik, atau metode untuk mencapai sesuatu yang sudah diinginkan. Pada dasarnya, strategi merupakan kombinasi antara perencanaan (*planning*) dan pengelolaan (*management*) yang bertujuan untuk mencapai sasaran. Namun, dalam proses pencapaian tersebut, strategi tidak hanya berperan sebagai peta jalan yang sekedar menunjukkan arah, tetapi juga harus mampu menjelaskan bagaimana pelaksanaan taktik operasionalnya.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi ialah ilmu dan seni menggunakan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Strategi dalam buku *Manajemen Strategik-Pengetahuan* yang dikutip oleh Kusumadmo (2013), secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu '*strategos*' yang terbentuk dari gabungan kata *stratos* (tantara) dan *ego* (pemimpin).¹⁹

Berdasarkan definisi strategi dalam konteks bahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang

¹⁸ Effendy and Onong Uchjana, *ILMU KOMUNIKASI (Teori Dan Praktek)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

¹⁹ E Kusumadmo, *Manajemen Strategik Pengetahuan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).

untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Berbicara tentang strategi dalam suatu organisasi, Wheelen dan Hunger menyatakan bahwa strategi ialah mencakup rumusan terkait proses yang dilakukan sebuah organisasi dalam mencapai visinya dan cara untuk mampu difungsikan ketika berkompetisi dan bersaing.²⁰

Berikutnya, istilah manajemen dan strategi bisa digabungkan dan menghasilkan makna baru. Menurut David, manajemen strategis diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai keputusan lintas fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya.²¹

2) Tahapan Manajemen Strategi

David menyebutkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam manajemen strategi, yaitu sebagai berikut:

a. Perumusan strategi

Langkah pertama dalam manajemen strategi adalah merumuskan strategi dengan memilih langkah-langkah utama yang bertujuan mewujudkan visi organisasi. Proses ini mencakup pencapaian visi dan misi, analisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, penilaian kekuatan dan kelemahan internal organisasi, penentuan tujuan jangka panjang,

²⁰ David J. Hunger and Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, ed. terj. Julianto Agung, Cet. 16 (Yogyakarta: Andi, 2003). hal. 16

²¹ Fred R. David, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2014). h. 6

serta penyusunan berbagai alternatif strategi untuk mencapai tujuan tersebut.²²

Visi dan misi berperan sebagai landasan utama dalam merancang strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi yang dibuat harus selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi. Visi merupakan gambaran singkat mengenai tujuan utama organisasi. Selain itu, perumusan strategi juga mempertimbangkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, sedangkan analisis lingkungan eksternal mencakup peluang dan ancaman yang berasal dari faktor-faktor luar organisasi.

Menurut konsep David, perumusan strategi mencakup penetapan tujuan jangka panjang yang harus dirumuskan dengan jelas, realistis, kuantitatif, mudah dipahami, dan dapat dicapai. Penetapan tujuan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan organisasi di masa depan.

Langkah berikutnya yaitu melakukan analisis dan pemilihan strategi tertentu yang sesuai guna mencapai tujuan. Analisis ini melibatkan pengolahan informasi dari tahapan sebelumnya untuk merumuskan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan.

²² Tedjo Tripomo and Udan, *Manajemen Strategi* (Bandung: Rekayasan Sains, 2005). 28

Semua kegiatan ini harus selaras dengan misi organisasi guna mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditetapkan.²³

b. Implementasi strategi

Implementasi merupakan upaya merealisasikan rencana yang telah dirumuskan melalui pembinaan dan pemberian motivasi kepada pelaksana kegiatan.

Salah satu langkah penting dalam tahap implementasi strategi adalah merumuskan kebijakan. Kebijakan berfungsi untuk membantu menyelesaikan masalah yang muncul selama proses pelaksanaan strategi sekaligus menjadi panduan dalam penerapan strategi. Kebijakan ini bertindak sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan tertentu yang didasarkan pada strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.²⁴

c. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi adalah proses pengawasan dan penilaian terhadap pencapaian hasil kinerja. Menurut Suchman, yang dikutip oleh Arikunto, evaluasi adalah proses untuk menilai hasil dari berbagai aktivitas yang telah direncanakan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan.²⁵

²³ Akdon, *Strategic Management for Educational Management* (Bandung: Alfabeta, 2016).

²⁴ Akdon. 187

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Organisasi Dan Administrasi Pendidikan, Teknologi, Dan Kejuruan* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 27

3) Strategi PERPENCA dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember berpedoman pada AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) yang dimiliki oleh PERPENCA. Pada AD/ART tersebut tercantum bahwa dalam menjalankan organisasi, PERPENCA memiliki 4 visi yang terdiri dari kesetaraan, pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, PERPENCA menetapkan misi untuk mewujudkan kesetaraan hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas dalam masyarakat melalui sarana dan upaya yang memadai, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai visi dan misi yang pada kenyatannya sangat berkaitan erat dengan terwujudnya kondisi kehidupan sejahtera atau kesejahteraan sosial yang optimal dari para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, PERPENCA memiliki tugas pokok yang harus dipenuhi, diantaranya:

(1) Melakukan koordinasi, konsultasi, kemitraan antara penyandang disabilitas, masyarakat dan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan penyandang disabilitas.

(2) Melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota.

Berdasarkan dua tugas pokok tersebut, maka terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan PERPENCA untuk memenuhinya, yaitu:

(1) Menggalang dan mengupayakan peningkatan potensi sumber daya dan sumber dana yang berasal dari pemerintah dan masyarakat.

(2) Membina keakraban dan kekeluargaan antar anggota, masyarakat dan pemerintah.

(3) Memperjuangkan lingkungan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.²⁶

2. Kesejahteraan Sosial

a. Pengertian kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial ialah segala bentuk tindakan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai keadaan sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, kesejahteraan sosial juga mencakup kegiatan pengelolaan dan penyediaan pelayanan sosial bagi berbagai kelompok masyarakat. Friendlander yang dikutip dalam Fahrudin (2018) mengungkapkan terkait konsep kesejahteraan sosial, yaitu suatu sistem terorganisir yang terdiri dari berbagai layanan sosial dan institusi yang dirancang untuk membantu individu maupun kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang layak, serta membangun hubungan personal dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan secara optimal sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.²⁷

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan material maupun non material. Kesejahteraan sosial ini tercapai ketika

²⁶ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPENCA

²⁷ Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Rafika Aditama, 2018). h.9

manusia hidup dalam kondisi aman dan bahagia karena kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan penghasilan terpenuhi, serta ketika manusia mendapatkan perlindungan dari berbagai resiko utama yang dapat mengancam kehidupannya.

Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi dalam mengatasi atau meredakan tekanan yang muncul sebagai dampak dari perubahan sosial dan ekonomi, mencegah dampak negatif sosial yang mungkin terjadi akibat pembangunan, serta menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Friedlander dan Apte yang dikutip dalam Fahrudin (2018) menyebutkan beberapa fungsi kesejahteraan sosial, diantaranya:

a) Fungsi pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari munculnya masalah sosial baru. Dalam upaya pencegahan, perhatian difokuskan pada kegiatan yang mendukung pembentukan pola hubungan sosial baru serta pengembangan lembaga-lembaga sosial yang inovatif.

b) Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan fisik, emosional, dan sosial, sehingga individu yang mengalami masalah tersebut dapat kembali berperan secara normal dalam

masyarakat. Tujuan ini juga mencakup aspek pemulihan atau rehabilitasi.

c) Fungsi pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk mendukung, secara langsung maupun tidak langsung, proses pembangunan serta pengembangan struktur dan sumber daya sosial di dalam masyarakat

d) Fungsi penunjang (*supportive*)

Kesejahteraan sosial berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya membangun atau mengembangkan tatanan serta sumber daya sosial di masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 90 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial penyandang disabilitas meliputi:

a) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial yang dimaksud disini ialah proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas

mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan dalam

bentuk:

- Motivasi dan diagnosis psikososial
- Perawatan dan pengasuhan
- Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- Bimbingan mental spiritual
- Bimbingan fisik

- Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- Pelayanan aksesibilitas
- Bantuan dan asistensi sosial
- Bimbingan resosialisasi
- Bimbingan lanjut
- rujukan

b) Jaminan sosial

Jaminan sosial ialah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh penyandang disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial ini diberikan dalam bentuk:

- Asuransi kesejahteraan sosial
- Bantuan langsung berkelanjutan
- Bantuan khusus (pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan)

c) Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan sosial ialah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan sosial ini dilakukan dalam bentuk:

- Peningkatan kemauan dan kemampuan

- Penggalian potensi dan sumber daya
- Penggalian nilai dasar
- Pemberian akses
- Pemberian bantuan usaha

d) Perlindungan sosial

Perlindungan sosial ialah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup penyandang disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial ini diantaranya berupa:

- Bantuan sosial
- Advokasi sosial
- Bantuan hukum

b. Kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam

Fungsi kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek utama, yaitu:

pencegahan (*preventive*) yang bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya musibah atau bencana, baik di tingkat lokal maupun nasional, penyembuhan (*curative*) dengan memberikan layanan pemulihan bagi korban yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengembangan (*development*) sebagai upaya menjaga kondisi sosial masyarakat agar tetap di atas standar kesejahteraan yang telah ditetapkan, serta penunjang (*supportive*) yang berperan dalam mendorong masyarakat untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas

kesejahteraan sosial yang sudah tercapai. Sementara itu, masalah kesejahteraan sosial dapat muncul akibat berbagai faktor, di antaranya:

- 1) Kemiskinan baik yang disebabkan oleh faktor struktural maupun fungsional yang membuat individu sulit keluar dari garis kemiskinan,
- 2) Konflik yang dipicu oleh diskriminasi dalam aspek agama, budaya, atau ras,
- 3) Serta tindakan kejahatan yang sering kali dilatarbelakangi oleh kecemburuan sosial, rasa tersinggung, atau ketimpangan ekonomi.²⁸

Dalam perspektif Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, kesejahteraan sosial dipandang sebagai hak universal yang berlaku bagi seluruh manusia, tanpa terbatas pada komunitas Muslim semata. Gagasan ini berlandaskan pada nilai-nilai *hablum minannas* serta prinsip *rahmatan lil alamin*. Kemajuan peradaban Islam telah menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia harus didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi hak milik golongan kaya, sementara golongan miskin dikesampingkan. Oleh karena itu, paradigma kesejahteraan dalam Islam

²⁸ Muhammad Fauzi, Awang Saputra, and Encep Syarifudin, "Konsep Kesejahteraan Sosial Lakatosian Dalam Perspektif Maqashid Shariah," *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2022): 174.

didasarkan pada harapan yang senantiasa disertai dengan nilai-nilai keadilan.²⁹

Islam membangun pondasi kesejahteraan yang ideal dengan menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, mencakup kehidupan individu serta sosial. Kesejahteraan yang dicita-citakan meliputi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan dimaknai sebagai tercapainya pemenuhan kebutuhan pokok setiap orang, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta adanya jaminan perlindungan terhadap agama, harta benda, kehidupan, akal, dan martabat manusia.³⁰

Islam mendefinisikan dan mewujudkan kesejahteraan sosial melalui berbagai tujuan, di antaranya:

- b. Manfaat (*maslahah*), yaitu melindungi tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam syariat guna mencegah kerugian dan meraih manfaat atau kebaikan. Sebagai makhluk hidup, manusia secara naluriah ingin memberikan manfaat melalui perbuatan baik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, hal ini harus tetap berlandaskan nilai-nilai syar'i, yakni tidak diperbolehkan melakukan kezaliman atau menggunakan sesuatu yang haram yang dapat menimbulkan kerugian atau keburukan.

²⁹ Fauzi, Saputra, and Syarifudin. 175.

³⁰ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 380–495.

Kesejahteraan sosial yang diraih seseorang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga dengan berupaya mencegah terjadinya hambatan terhadap kesejahteraan sosial orang lain.³¹

Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap keburukan atau kezaliman, sebagaimana disebutkan dalam Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaknya di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada Kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”

c. Kebaikan (*shaliha*), Dimaknai sebagai usaha untuk meraih kebaikan yang mencakup kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Setiap kebaikan yang dicapai akan memberikan manfaat, baik secara pribadi maupun bagi orang lain. Kebaikan tersebut diwujudkan melalui tindakan individu atau kelompok yang memberikan pengaruh positif. Aktivitas tersebut tidak hanya meningkatkan taraf hidup, tetapi juga mencegah seseorang jatuh

³¹ W.A Ghafur, *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial* (Bantul: Samudra Biru, 2012).

di bawah garis kesejahteraan sosial.³² Sebagaimana yang terkandung pada surah an-nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan Kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

- d. Kedamaian (*salam*), dimaknai sebagai upaya untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat, yang dilakukan dengan usaha terbaik dan dilandasi oleh harapan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari ikhtiar, yakni melalui tahapan atau proses tertentu yang tidak hanya membawa keselamatan bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Hal ini dapat direalisasikan melalui kebiasaan saling mengucapkan salam, yang berfungsi sebagai lambang perdamaian serta penguat ajaran dan nilai-nilai dalam Islam. Islam hadir untuk membawa keselamatan dan kebaikan bagi

³² Asep Usman Ismail, “Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur’an,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, no. 1 (2015): 45–47.

dunia dan akhirat, memberikan rasa aman dari ketakutan, kekurangan, dan ancaman.³³

e. Kebahagiaan (*al-falah*), kebahagiaan yang bersifat hakiki, bukan semu. Kebahagiaan yang semu hanya bersifat sementara, mudah datang dan cepat menghilang. Sebaliknya, Islam menawarkan harapan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, asalkan seseorang menjalankan ajaran syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Melalui upaya meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, kesejahteraan sosial juga dapat diwujudkan, meskipun tidak bersifat abadi. Namun demikian, pahala dan amal baik yang dilakukan akan memberikan manfaat di kehidupan akhirat.³⁴

f. Keberuntungan (*muflib*), diartikan sebagai kesuksesan atau keberuntungan yang diraih melalui usaha keras dan ikhtiar yang sempurna. Menjadi sukses sebagai manusia tidak datang begitu saja tanpa perjuangan, karena sesuai dengan sunnatullah, setiap kegiatan, termasuk mencapai kesejahteraan sosial, memerlukan upaya. Keberuntungan biasanya diukur dengan banyaknya materi yang dimiliki, namun dalam Islam, sukses tidak hanya dilihat dari materi, tetapi juga dari kesejahteraan spiritual yang

³³ W.A Ghafur, *Kesejahteraan Sosial Dalam Al-Qur'an: Konsep Dan Paradigma* (Yogyakarta: Dakwah Press Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2014).

³⁴ Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*.

diperoleh. Islam sangat menekankan keseimbangan antara aspek materi dan spiritual. Seiring dengan kesuksesan materi, seorang Muslim wajib menunaikan zakat dan melaksanakan haji sebagai bagian dari tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.³⁵

Dalam penjelasan di atas, penting untuk memperhatikan bagaimana Islam menjadikan indikator pencegahan dan pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk keberlanjutan di masa depan, serta untuk membangun kepedulian sosial dalam jangka panjang. Hal ini bertujuan agar anak cucu generasi mendatang tidak terjebak di bawah standar kesejahteraan yang berlaku, yang dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, prinsip kesejahteraan sosial yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi tujuan hidup manusia, dengan menerapkan syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan individu dan kelompok. Prinsip ini menyeimbangkan antara kebutuhan materi dan spiritual, memberikan manfaat, serta menjadikan seseorang sebagai manusia yang sebaik-baiknya. Namun, penting untuk ditekankan bahwa kesejahteraan yang diperoleh oleh seorang Muslim harus terbebas dari kemiskinan, kekufuran, kebodohan, praktik riba, perjudian (maisir), serta rasa takut. Dengan demikian, keimanan dapat diperkuat dan

³⁵ Ismail, "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an."

berbagai bentuk kezaliman dapat dihindari, yang pada akhirnya diwujudkan melalui perbuatan baik dan amal shaleh.³⁶

3. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, yang menyebabkan mereka menghadapi hambatan serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya.³⁷ Karena adanya perubahan paradigma, penyandang disabilitas telah mengalami perubahan istilah yang bertujuan untuk menggunakan istilah yang lebih halus sekaligus meningkatkan penghargaan dan martabat penyandang disabilitas, karena makna dari istilah tersebut memengaruhi persepsi, sikap, dan pola pikir masyarakat terhadap mereka.³⁸ Berikut pergeseran istilah-istilah penyebutan dan pendekatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

³⁶ Isma Swadjaja, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Unti Ludigdo, "Model of Islamic Wealth Management Based on Maqasid Al-Shariah," *Journal of Innovation in Business and Economics* 3, no. 02 (2019): 63–72.

³⁷ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. 9

³⁸ Febi Harap, "Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kota Medan" (Universitas Medan Area, 2022). 19-20

Tabel 2.2
Istilah penyebutan penyandang disabilitas

	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Istilah sebutan yang digunakan	Penyandang cacat	Difabel, penyandang ketunaan, anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas
Model pendekatan	<i>Medical model, Traditional model, Individual model</i>	<i>Social model</i>
Sifat pendekatan	<i>Charity</i> (belas kasihan)	Hak asasi (<i>Human Rights-Approach</i>)

Sumber: Skripsi Suhailah Hayati Tahun 2019

b. Jenis-jenis disabilitas

a) Penyandang disabilitas sensorik, ialah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.³⁹

(b) Tunanetra ialah mereka yang mengalami gangguan penglihatan.

Tuna netra dibagi menjadi beberapa kategori: *Totally Blind* dan *Low Vision*. *Totally Blind* adalah suatu kondisi di mana seseorang

hanya dapat melihat bayangan cahaya, yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara lingkungan yang gelap dan terang. Sedangkan, mereka kehilangan beberapa penglihatan saat memiliki *low vision* dan jarak pandang maksimum adalah 6 meter, dengan bidang pandang maksimum 20° (derajat).

³⁹ Perda Jember No. 7 Tahun 2016, penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf d.

Mengenakan kacamata tidak akan membantu masalah ini. Selain dua kategori tersebut, terdapat satu kategori lainnya, yaitu tunanetra setengah berat (*Partially Sighted*) ialah suatu kondisi yang menunjukkan individu kehilangan sebagian daya penglihatannya, di mana mereka hanya mampu membaca tulisan yang bercetak tebal.

- (c) Tuna rungu dan/atau wicara, tunarungu menghadapi kesulitan dalam mendengar, sedangkan tuna wicara menghadapi kesulitan dalam komunikasi verbal. Mereka yang tuli sejak kecil berisiko mengalami masalah bicara. Gangguan bicara seseorang, di sisi lain, tidak selalu berarti bahwa mereka tuli. Karena pita suara atau organ verbal mereka mungkin satu-satunya masalah.
- b) Penyandang disabilitas intelektual, seperti lamban belajar, tunagrahita, dan *down syndrome*, di mana fungsi pikiran terganggu karena tingkat kecerdasan yang lebih rendah. Tunagrahita mempunyai intelegensi di bawah rata-rata, selain itu mereka mengalami kesulitan dalam adaptasi perilaku atau dapat dikatakan mereka kesulitan memahami dan bersosialisasi. Selain itu, mereka mengalami kesulitan dalam mengurus diri sendiri, sehingga keterampilan yang mereka butuhkan meliputi kemampuan untuk berkembang dan bersosialisasi. Berdasarkan uraian tersebut, alangkah baiknya jika kita berinteraksi dengan mereka dalam bahasa sehari-hari yang sederhana dan menyampaikan informasi secara

jelas, singkat, bertahap, dan konsisten.⁴⁰ Sedangkan *Down Syndrome* (SD), juga dikenal sebagai kelainan genetik trisomi, menyebabkan keterlambatan perkembangan, gangguan belajar, penyakit kardiovaskular, dan bahkan kanker darah/leukemia.⁴¹

- c) Penyandang disabilitas fisik, seperti amputasi, kelumpuhan atau kekakuan, paraplegi, *cerebral palsy* (CP) atau dengan kata lain ialah terganggunya fungsi gerak. Penyandang cacat fisik, sering dikenal sebagai tunadaksa, adalah orang yang tidak dapat menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuhnya dengan baik karena lumpuh, kaku, tidak nyaman, atau penyakit lainnya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh bawaan, penyakit, usia tua, atau kecelakaan.⁴²
- d) Penyandang disabilitas mental, seperti masalah dalam kognisi, emosi, atau perilaku, seperti:
- (a) Gangguan psikososial seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian.
 - (b) Autisme dan hiperaktif adalah dua gangguan perkembangan yang mempengaruhi keterampilan interaksi sosial. Autisme adalah kondisi perkembangan pervasif yang ditandai dengan kelainan kognitif, linguistik, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial, serta

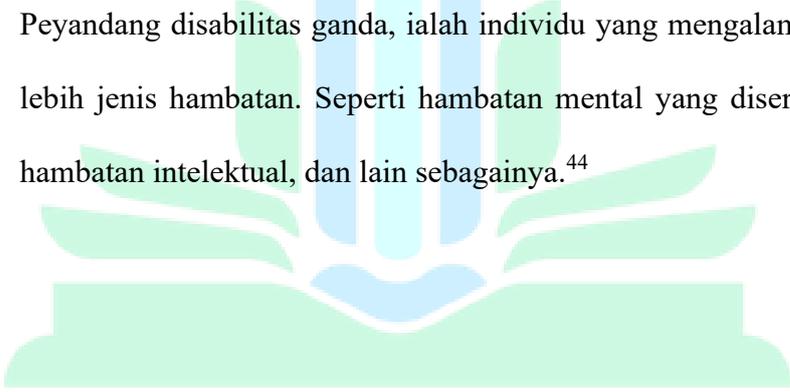
⁴⁰ Ardhi Wijaya, *Teknik Mengajar Siswa Tunagrahita (Disabilitas Intelegensi-Gangguan Intelektual)* (Yogyakarta: Kyta, 2013). 22

⁴¹ Irwanto, *A-Z Sindrom* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019). 1

⁴² Perda Jember No. 7 Tahun 2016, penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a.

kesulitan motorik, dapat dikatakan, kognisi sosial merupakan hambatan yang menjadi karakteristik umum mereka. Tanda-tanda utama hiperaktif, juga dikenal sebagai gangguan hiperkinetik, adalah ketidakmampuan untuk fokus, hiperaktif, dan impulsif. Orang hiperaktif juga dikenal memiliki kemampuan skolastik di bawah standar, lalai dalam situasi sosial, sembrono dalam menghadapi situasi berisiko, dan tidak mematuhi aturan secara impulsif (melakukan sesuatu tanpa berpikir).⁴³

- e) Peyandang disabilitas ganda, ialah individu yang mengalami dua atau lebih jenis hambatan. Seperti hambatan mental yang disertai dengan hambatan intelektual, dan lain sebagainya.⁴⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴³ Ni'matuzahroh and Yuni Nurhamida, *Individu Berkebutuhan Khusus Dan Pendidikan Inklusif* (Malang: UMM Press, 2016). 32

⁴⁴ Ni'matuzahroh and Nurhamida. 33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember” merupakan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pengalaman, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya.⁴⁵ Creswell menyebutkan beberapa ciri penelitian kualitatif, yaitu peneliti dalam sebuah penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci yang lumrahnya turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data. Selain itu, sumber data yang digunakan beragam seperti observasi, wawancara, maupun dokumentasi.⁴⁶

Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai suatu fenomena tertentu. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi terkait kondisi sosial, seperti menggambarkan karakteristik tertentu dari sebuah sampel atau

⁴⁵ Feny Rita Fiantika et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). 4

⁴⁶ Muhammad Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Penerbit Tahta Media Group, 2022). 31-32

populasi penelitian.⁴⁷ Penelitian deskriptif yang dilakukan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang strategi yang digunakan PERPENCA dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) yang berada di Jl. Imam Bonjol 164, Kaliwates-Jember. Lokasi ini dipilih karena PERPENCA merupakan komunitas persatuan yang menjadi wadah komunikasi bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember memiliki empat visi yang salah satunya menyangkut terkait kesejahteraan penyandang disabilitas, sehingga hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini yaitu terkait upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini memiliki subyek penelitian yang ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sebuah metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik sampel. Teknik ini dilakukan secara sengaja dengan memilih sampel tertentu yang memiliki karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat khusus. Oleh karena itu, pemilihan sampel ini tidak dilakukan secara acak.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penyandang

⁴⁷ Elvis F. Purba and Parulian Simanjutak, *Metode Penelitian* (Medan: Percetakan SADIA, 2012). 19

⁴⁸ Akhmad Fauzy, *Metode Sampling* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019). hal. 1.25

disabilitas yang tergabung dalam PERPENCA menjadi pilihan yang tepat untuk subyek penelitian yang dibutuhkan. Berikut beberapa ketentuan kriteria sampel pada penelitian ini:

- a) Pengurus PERPENCA yang dipilih menjadi *key informant* atau informan kunci karena mempunyai dan mengerti semua informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b) Anggota PERPENCA Jember:
 - Telah menjadi anggota PERPENCA setidaknya dalam kurun waktu satu tahun dengan dibuktikan adanya kartu tanda anggota
 - Aktif dalam mengikuti program-program yang diadakan oleh PERPENCA

Adapun subyek yang dipilih peneliti ini nantinya akan berperan sebagai sumber data pada penelitian ini. Berdasarkan ketentuan kriteria yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki subyek 4 orang dengan rincian:

- 1) Asrorul Mais, dipilih karena merupakan pendiri PERPENCA yang mempunyai dan mengerti semua informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menjawab fokus penelitian ini
- 2) Moh. Zaenuri Rofi'I (Ketua PERPENCA), dipilih menjadi *key informant* atau informan kunci karena mempunyai dan mengerti semua informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menjawab fokus penelitian ini
- 3) Ahmad Yasin, anggota aktif PERPENCA
- 4) Ari Handoko, anggota aktif PERPENCA

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Observasi

Penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu jenis observasi dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis, dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang objek yang sedang diteliti.⁴⁹ Informasi yang akan diambil dengan observasi ini ialah terkait kondisi hidup atau kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

2) Wawancara

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara yang tujuannya adalah untuk mengeksplorasi permasalahan secara lebih terbuka, memungkinkan responden untuk menyampaikan pendapat serta ide-idenya. Selama wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan cermat dan mencatat secara rinci informasi yang disampaikan oleh responden.⁵⁰ Adapun informasi yang ingin diperoleh adalah:

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 23rd ed. (ALFABETA, 2016). 145

⁵⁰ Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif*. 163

- Mengetahui bentuk hambatan pemenuhan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.
- Mengetahui strategi PERPENCA yang digunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman berbagai peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Bentuknya bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang diciptakan oleh individu. Pada penelitian, biasanya dokumentasi digunakan sebagai pelengkap pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Hasil pengumpulan data melalui dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumen Profil PERPENCA yang memuat sejarah berdiri, visi & misi, tujuan, struktur organisasi, dan data subyek penelitian. Selain itu, dokumen lain yang dikumpulkan adalah berupa foto kegiatan penelitian.

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi baru. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman karakteristik data sehingga dapat digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan, terutama yang berhubungan dengan penelitian.⁵¹ Miles dan

⁵¹ Almira Keumala Ulfah et al., *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, Dan Pengembangan)* (Madura: IAIN Madura Press, 2022). hal. 1

Huberman (1984) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkesinambungan hingga data mencapai tingkat kejenuhan. Proses analisis data meliputi empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informasi diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta kombinasi ketiganya, yang dikenal sebagai triangulasi. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan oleh para peneliti biasanya sangat beragam dan dalam jumlah yang besar.

2) Reduksi data

Reduksi data berfungsi untuk mempermudah peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari data-data yang telah diperoleh. Semakin lama seorang peneliti berada di lapangan, semakin banyak, kompleks, dan rumit data yang terkumpul. Oleh karena itu, analisis data perlu segera dilakukan melalui proses reduksi data yang melibatkan proses merangkum, memilih informasi utama, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting.

3) Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan bentuk lainnya. Penyajian data ini membantu mempermudah pemahaman

terhadap apa yang terjadi, sekaligus menjadi dasar untuk merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

4) Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman ialah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, tetapi juga memungkinkan untuk tidak sepenuhnya sesuai, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan proses pengumpulan data di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini seringkali berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau kurang terdefinisi.⁵²

F. Keabsahan Data

Penelitian ini dalam membuktikan keabsahan data menggunakan dua jenis triangulasi, diantaranya triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber mengacu pada pengujian data yang diperoleh dari berbagai informan atau sumber informasi. Metode ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber atau informan. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada analisis data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi dari berbagai perspektif oleh peneliti.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022). 129-141

Jenis triangulasi kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik, yaitu digunakan untuk menguji keabsahan data dengan memverifikasi kebenarannya dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik. Artinya, peneliti menerapkan beragam metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Dalam praktiknya, peneliti dapat mengombinasikan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian disatukan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih valid.⁵³

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan rangkaian langkah yang dijalankan secara sistematis, terorganisir, jelas, dan sesuai prosedur. Dalam penelitian kualitatif ini terdapat tiga tahapan penelitian, diantaranya:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan dan menyusun rancangan penelitian. Lalu Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi lokasi penelitian dan mengurus perizinan penelitian, mencari dan menetapkan informan penelitian, serta mempersiapkan bahan atau instrument yang akan digunakan selama penelitian berlangsung.

2. Tahap Pelaksanaan

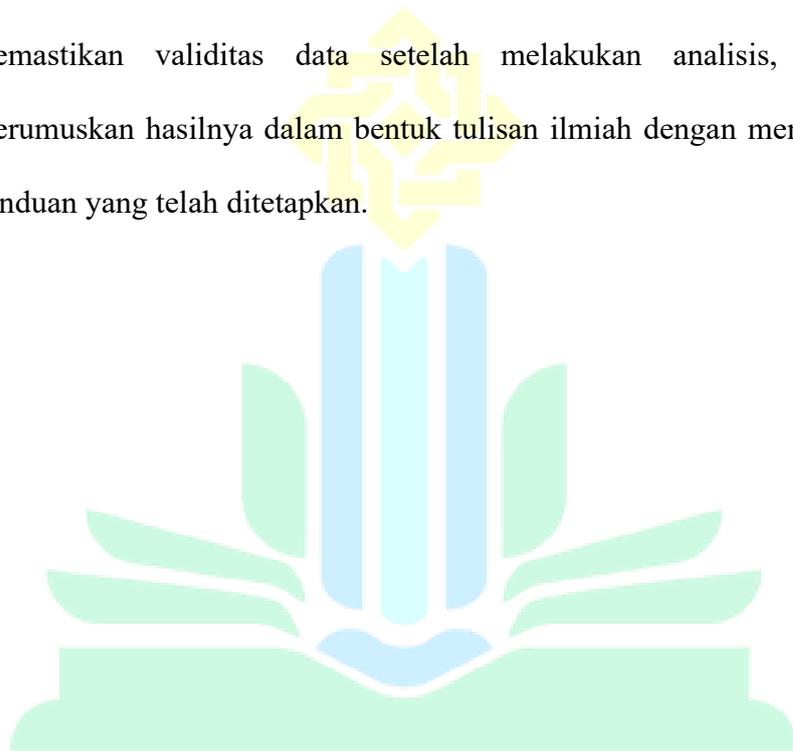
Setelah menyelesaikan tahap pra-penelitian, peneliti melanjutkan ke tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti secara aktif mengumpulkan data

⁵³ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 828–29.

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap ini adalah proses pengolahan data, yang mencakup analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti memastikan validitas data setelah melakukan analisis, kemudian merumuskan hasilnya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan mengacu pada panduan yang telah ditetapkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 2 memiliki ketentuan yang digunakan sebagai acuan yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, ini bermakna bahwa tidak ada perbedaan maupun pembedaan untuk setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan, baik warga masyarakat umum maupun warga masyarakat penyandang cacat. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Pasal 6 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Selain itu, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat juga mengatur mengenai hal tersebut.

Secara hukum internasional, sebuah negara mempunyai 3 kewajiban pokok untuk memenuhi hak-hak asasi warga negarang, diantaranya *ialah to respect* (menghormati), *to protect* (melindungi), dan *to faithful* (memenuhi). Penyandang cacat yang juga merupakan salah satu bagian dari komponen bangsa masih sering mengalami ketidakadilan dan

kemungkinan ketidakpedulian terhadap nasibnya, seperti kurangnya jaminan kesehatan (kurang terjangkau biaya pelayanan dan alat-alat kesehatan serta alat bantu kecacatan bagi masyarakat penyandang cacat), fasilitas umum yang Sebagian besar tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat, fasilitas dan akses pendidikan yang kurang memihak bagi penyandang cacat, lalu di bidang politik, Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan DPR tidak mengakomodir kondisi penyandang cacat dengan adanya pasal yang mensyaratkan cakap bicara, membaca, serta menulis dalam bahasa Indonesia yang mana hal itu menyinggung kondisi penyandang cacat. Kemudian yang terakhir adalah di bidang pekerjaan, sebagian besar Perusahaan belum melaksanakan peraturan untuk mempekerjakan 1 orang penyandang cacat untuk setiap perusahaan yang memiliki minimal 100 karyawan.

Terdorong kebutuhan dari penyandang cacat di Kabupaten Jember akan sebuah wadah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, mengekspresikan diri guna memperoleh pengakuan sosial, membangun solidaritas sesama penyandang disabilitas, serta mempererat tali silaturahmi antar mereka, maka setelah melalui serangkaian musyawarah, dialog, dan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk Dinas Sosial, pada tanggal 9 Juli 2003 disepakati pembentukan sebuah organisasi bernama Persatuan Penyandang Cacat Jember (Perpenca Jember) yang dilaksanakan di LBK Kaliwates Jember. Proses pendirian organisasi ini difasilitasi oleh

Dinas Sosial dan turut disaksikan oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Sosial, dengan dihadiri lebih dari 50 orang penyandang disabilitas dari berbagai jenis, seperti tuna daksa, tuna netra, tuna rungu wicara, dan tuna grahita, serta berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam.⁵⁴ Kemudian karena adanya kebijakan baru Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka kepanjangan Perpenca yang semula ialah Persatuan Penyandang Cacat diubah menjadi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi.

2. Visi dan Misi Lembaga

a. Visi Lembaga

Tercapainya:

- 1) Kesetaraan;
- 2) Pemberdayaan;
- 3) Kemandirian;
- 4) Kesejahteraan.

Bagi penyandang cacat baik untuk diri sendiri maupun sesama.

b. Misi Lembaga

Mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat di masyarakat dengan sarana dan upaya yang memadai, terpadu, dan berkesinambungan.

⁵⁴ Profil PERPENCA Jember, 23 April 2025.

3. Legalisasi Lembaga

Nama Lembaga : Persatuan Penyandang Cacat Jember
No. Akte : 46/Y/2003
Alamat : Jalan Imam Bonjol 164 Kaliwates Jember
Sekretariat : 68133
Telepon : (0331) 7839398, 3091305
Fax : (0331) 481562
HP : 085259696418
e-mail : perpencajr@yahoo.co.id

4. Susunan Pengurus

Ketua : Moh. Zaenuri Rofi'I, SE, S.Pd
Wakil Ketua : Didik Hartono
Sekretaris I : Ari Handoko
Sekretaris II : Mulyadi
Bendahara I : Ahmad Yasin, ST
Bendahara II : Vian Imuniatun
Seksi-seksi:

1. Seksi Alat Alat Bantu : Muaral Amir Hamzah
2. Seksi Pelatihan Keterampilan : Moh. Efendi, ST
3. Seksi Koperasi : Eko Pemali, SP
4. Seksi Olahraga : Basori
5. Seksi Kekeluargaan : Sri Dafir, Siti Khuzaimah
6. Seksi Kerohanian : Muh.. Sholeh

7. Seksi Informasi dan Komunikasi

- a. Teguh Hidayatur Rahman (Tuna Rungu)
- b. Muaral Amir Hamzah (Tuna Daksa)
- c. Dinka Yuliani (Tuna Netra)

Perwakilan Kecamatan

1. Kecamatan Ajung : Muaral Amir Hamzah
2. Kecamatan Kaliwates : Ali
3. Kecamatan Sukorambi : Moh. Haris Syamsul Hadi
4. Kecamatan Patrang : Paijo
5. Kecamatan Arjasa : Ahmad
6. Kecamatan Ambulu : Agus Sobirin
7. Kecamatan Jenggawah : Dafir
8. Kecamatan Mumbulsari : Ali
9. Kecamatan Kencong : Amar
10. Kecamatan Puger : Cipto Perturi
11. Kecamatan Panti : Kunainah
12. Kecamatan Pakusari : Juhaeri
13. Kecamatan Jenggawah : Moh. Sholeh

5. Tujuan Lembaga

- 1) Sebagai sarana untuk menjembatani antara pemerintah dengan penyandang cacat begitu juga sebaliknya
- 2) Mempersatukan penyandang cacat se-Kabupaten Jember

- 3) Sebagai forum komunikasi dan silaturahmi para penyandang cacat se-Kabupaten Jember

B. Penyajian dan Analisis Data

Bagian ini merupakan pokok dari penelitian yang menjabarkan hasil temuan di lapangan dan relevan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis data tersebut guna menguji validitasnya melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan data hasil penelitian lapangan yang disusun berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk Hambatan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember

- a. Bentuk hambatan pemenuhan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember

Salah satu bentuk kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dapat dipenuhi melalui rehabilitasi sosial, yaitu hak agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, yang memiliki indikator yaitu salah satunya adalah mendapatkan penerimaan yang baik dari masyarakat. Namun yang terjadi sebenarnya pada penyandang disabilitas di Kabupaten Jember tidak sepenuhnya mencerminkan hal ideal yang seharusnya mereka dapatkan, hal ini didasarkan pada wawancara yang telah dilakukan bersama pendiri Perpenca sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau ngomong penerimaan, masyarakat itu juga masih rentan dengan stigma. Sampai sekarang masih tetap. Jadi kalau hanya bedanya, apa bedanya perlakuan masyarakat pada

difabel saat ini dengan yang dulu-dulu? Kalau dulu itu diskriminasi dilakukan terang-terangan dan nyata. Seperti sekolah menolak difabel dulu tidak ada susah-susahanya. Tapi kalau sekarang tidak berani mereka melakukan itu. Menerima itu. Meskipun secara dukungan sistem, dukungan kebijakan dan sebagainya, untuk gaimana caranya difabel bisa sekolah, Itu masih kurang optimal juga”⁵⁵

Hasil wawancara di atas didukung juga dengan pernyataan dari salah satu penyandang disabilitas yang tergabung dalam Perpenca sebagai berikut:

“Kalau dari masyarakat ya mungkin ada sih satu dua yang masih nganggap kita disabilitas itu orang yang dalam tanda kutip ‘tidak mampu’. Padahal kan sebenarnya kita itu bisa tapi dengan cara yang berbeda. Stigma negative itu yang masih ada”⁵⁶

Adanya stigma negatif tersebut tidak hanya berlaku di masyarakat umum saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas, ternyata masih ada isu tentang penerimaan keluarga terutama orang tua terhadap anaknya yang memiliki hambatan dianggap sebagai aib:

“untuk peran keluarga itu hal pertama harus menerima kenyataan bahwa si anaknya itu disabilitas ya. Kadang-kadang kan ada keluarga yang tidak menerima, malahan ada yang disipen gitu loh, diisolasi gitu ya”⁵⁷

⁵⁵ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025.

⁵⁶ Ari Nugroho, Anggota Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025.

⁵⁷ Ari Nugroho, Anggota Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025.

Selain kenyataan bahwa masih ada keluarga yang masih melihat salah satu anggota keluarganya yang merupakan penyandang disabilitas sebagai aib, para penyandang disabilitas di Jember juga kerap mengalami rasa tidak percaya diri akan hambatan yang dimiliki, sehingga hal itu membuat mereka ragu untuk melakukan kegiatan sosial masyarakat:

“Biasanya itu kan karena dari kitanya yang kurang berkomunikasi dengan pihak luar atau masyarakat sekitar itu akhirnya negative thinking sendiri. Padahal dari kita dulu yang harus membuka diri, baru mereka tau apa keinginan kita gitu”⁵⁸

“Tapi kita yang merasa ada hambatan, misalnya ketika saya ada undangan, ketika saya melewati jalan untuk masuk ke tempat itu terus terjatuh, siapa yang mau tolong, kan gitu perasaannya. Mungkin bagi yang normal, biasa aja nggak ada hambatan, sehingga tidak mengerti beretika dengan orang disabilitas itu seperti apa, apa perlu dibantu atau gimana kan gak tau. Akhirnya saya sendiri jarang datang kalau diundang di suatu acara, kecuali saudara. Saudara pun juga kadang ya perlakuannya nggak sama dengan yang lain”⁵⁹

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan adanya hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yang memiliki hambatan fisik, khususnya untuk penyandang disabilitas daksa polio dengan kelumpuhan di tungkai bawah yang menyebabkan mereka kesulitan dalam mobilitas sehari-hari, sehingga mereka pun masih belum bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal, ditandai dengan kurangnya partisipasi dalam setiap kegiatan di masyarakat karena keterbatasan fisik yang dialami.⁶⁰

⁵⁸ Ari Nugroho, Anggota Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025.

⁵⁹ Ahmad Yasin, Anggota Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025

⁶⁰ Hasil observasi peneliti pada Ahmad Yasin, Jember, 16 April 2025

b. Bentuk hambatan pemenuhan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember

Kesejahteraan sosial penyandang disabilitas selanjutnya bisa dilihat dalam bentuk jaminan sosial, yaitu jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, baik itu sandang, pangan, dan papan. Aksesibilitas terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun kesehatan. Salah satu bentuk hambatan dalam pemenuhan jaminan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember ialah pemenuhan kebutuhan dasar yang masih belum optimal, seperti yang dikemukakan oleh pendiri Perpenca sebagai berikut:

“Jadi secara umum, data secara umum kan secara WHO ya. WHO menyatakan dalam datanya, satu dari sepuluh orang miskin di Indonesia itu adalah difabel. Bahkan hampir semua di setiap satu KK dari orang miskin di Indonesia pasti ada difabelnya. Artinya apa? Memang difabel dengan kemiskinan itu masih sesuatu yang sangat berkaitan. memang karena kemiskinan, kurangnya pemahaman ilmu, kurang gizi dan sebagainya, lahirlah anak keturunan difabel. Dari difabel dia didiskriminasi, dia tidak bisa sekolah, dia tidak dapat kerja, miskin lagi, teruss seperti itu. Jadinya seperti lingkaran setan, siklus setan”⁶¹

Hasil wawancara bersama pendiri di atas juga didukung oleh pernyataan dari salah satu penyandang disabilitas yang tergabung dalam Perpenca, sebagai berikut:

“Ya alhamdulillah saya itu masih ada skill lah, jadi kalau dibanding dengan teman-teman saya yang lain itu, sudah sekolahnya nggak lulus, dukungan orang tua nggak ada, kadang ekonomi juga lemah, akhirnya kan ya kadang minta-minta gitu, mengharap bantuan dari pemerintah”⁶²

⁶¹ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

⁶² Ahmad Yasin, Anggota Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penyandang disabilitas di Jember yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ialah dukungan keluarga yang masih kurang:

“kendalanya ya tidak semuanya bisa kita jangkau kan ya memang hambatan disabilitas itu adalah akses, ya mungkin akses informasi mungkin di keluarga itu tidak semuanya mereka dipublikasikan, bahkan saya dapat info dari beberapa temen itu ada yang sampe tidak dimasukkan di KK karena mungkin malu”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang memuat bahwa dukungan orang tua yang kurang untuk para penyandang disabilitas pada akhirnya menghadirkan banyak hambatan dalam pemenuhan jaminan sosial, seperti sulitnya akses terhadap layanan kesehatan maupun bantuan sosial karena penyandang disabilitas yang tidak terdata dalam kependudukan seperti pernyataan berikut:

“karena misalnya sekarang BPJS juga seperti mereka harus masuk di KK. Misalnya program-program yang di BPNT bahkan mungkin bantuan alat kesehatan, kruk dan lain-lain itu harus terdata dulu di adminduk”

“kalau misalnya dia sudah tidak masuk ke dalam KK ya tetap tentang akses dari pemerintah dia bakalan kesulitan, misalnya tentang adminduk terus terkait dengan bantuan-bantuan dari program pemerintah, misalnya PKH kemudian BPNT, sembako, itu jelas mereka tidak mungkin terlayani karena dia tidak masuk dalam database pemerintah”⁶⁴

⁶³ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

⁶⁴ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

Hambatan lainnya juga terdapat dalam bentuk kurangnya perhatian para *stakeholder* terhadap para penyandang disabilitas dalam mengakses kebijakan dari pemerintah, sesuai dengan pernyataan berikut:

“Kalau bantuan sosial itu memang kayak kemarin COVID itu ada bantuan sosial, kayak BLT dan sebagainya ada sih. Hanya kan gini, kalau ngomong kayak gitu kita tahu data dasar untuk seseorang penerima bantuan itu kan sumbernya dari desa. Dan tidak semuanya desa itu kadang-kadang memprioritaskan difabel sebagai penerima bantuan”⁶⁵

Pernyataan tentang tidak semua desa memprioritaskan para difabel ini juga didukung oleh pernyataan langsung dari penyandang disabilitas di Jember berikut:

“nah ini pengalaman saya juga kemarin, terkait yang sudah saya data tentang disabilitas, saya kan mau ngecek di desa itu punya nggak datanya gitu, saya tanya ke sekdes arjasa, terus sekdesnya mengeluarkan data disabilitas yang mendapatkan bantuan beras, itu ada 15 orang, terus saya cek nama-namanya, ternyata bukan disabilitas, jadi yang dapat beras itu bukan disabilitas juga bukan data disabilitas itu. Itu orang biasa tapi mungkin ngakunya ke sekdes kalau dia orang disabilitas”⁶⁶

Berbagai pernyataan di atas membuktikan bahwa tidak optimalnya pemenuhan jaminan sosial bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pendidikan menjadi faktor lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak jaminan sosial bagi

⁶⁵ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

⁶⁶ Ahmad Yasin, Anggota Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025

para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Dengan pendidikan yang seharusnya menjadi hak untuk ditempuh dengan baik oleh para difabel diharapkan bisa membuat penyandang disabilitas ini dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. Akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan pernyataan berikut ini:

“Kemarin Perpenca itu mengadakan riset, saya yang memimpinya, itu kami mengambil sampel 10 desa, 5 desa di kota, 5 kelurahan di desa. Hasilnya rata-rata dari 10 itu hampir setiap desa di Kabupaten Jember itu rata-rata ada sekitar 10 orang difabel usia sekolah tapi tidak bersekolah. Ada 10, Jember itu kalau tidak salah punya 264 desa. Kalau dikalikan 10 berarti ada 2600 difabel usia sekolah yang tidak bersekolah. Itu contoh nyata di dunia pendidikan”⁶⁷

Kenyataan bahwa masih banyak didapati penyandang disabilitas usia sekolah di Kabupaten Jember yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan ternyata diakibatkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

“dari sisi jumlah sekolah saja bisa dikatakan masih kurang, harusnya kan satu kecamatan itu satu SLB. Nah saya kan kebetulan kuliah di Unipar, nah KKN nya tuh mendata teman-teman disabilitas di Arjasa ya untuk nantinya kedepannya diadakan perintisan sekolah SLB gitu, nah itu banyak ditemui meeka tuh kesulitan transportasi, kan jarak dari rumah ke sekolah jauh banget ya, terus kebanyakan disabilitas itu berasal dari keluarga kurang mampu, itu juga yang menjadi kendala mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan”⁶⁸

⁶⁷ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

⁶⁸ Ari Nugroho, Anggota Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025.

Hasil wawancara di atas tentang hambatan yang mempengaruhi banyaknya difabel usia sekolah yang tidak mengenyam bangku pendidikan diperkuat oleh hasil observasi peneliti bahwa memang benar masih banyak penyandang disabilitas, khususnya yang berada di usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan formal dikarenakan lokasi tempat tinggal yang jauh dari SLB, kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, serta kesadaran diri dari keluarga khususnya orang tua terhadap pendidikan anak yang relatif kurang.

c. Bentuk hambatan pemenuhan pemberdayaan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember

Pemberdayaan sosial ini merupakan hak penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan potensi sehingga nantinya dapat membuat mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu tangguh dan mandiri. Dalam pemenuhan pemberdayaan sosial terdapat beberapa bentuk hambatan untuk para penyandang disabilitas ini dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, seperti pernyataan berikut:

“Dengan SDM yang rendah, apa yang mau dia lakukan, yang kedua adalah kepercayaan masyarakat dalam melihat disabilitas. Sama-sama jualan makanan, satunya penjualnya difabel, satunya enggak difabel. Orang pasti pilih makanannya dijual oleh orang yang enggak difabel. Itu realita. Stigma itu yang menjadi kendala. Yang kedua itu faktor eksternal ya. Faktor internal tadi SDM. Faktor eksternal ini adalah dukungan dari pemerintah. Pemerintah jarang memfasilitasi disabilitas ini untuk berwirausaha. Minimal bupati yang meng-endorse produk-produknya difabel misalnya. Atau mungkin difabel kan ada yang pintar menjahit, Oh seragamnya Pemda yang jahit difabel. Cateringannya Pemda yang masak teman-

teman difabel. Ini kan nyatanya tidak dilakukan. itu kurangnya support itu yang menjadi salah satu hambatan”⁶⁹

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa hambatan yang menyebabkan difabel kesulitan untuk bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri disebabkan karena masih adanya stigma di masyarakat tentang kepercayaan terhadap kemampuan penyandang disabilitas. Lalu faktor lain disebabkan kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap potensi yang dimiliki penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

Cara lain agar penyandang disabilitas dapat memiliki kehidupan yang mandiri selain dengan memiliki usaha mandiri adalah dengan memiliki pekerjaan tetap yang dapat menunjang kehidupan mereka. Hal terkait pekerjaan ini sebenarnya sudah ada kebijakan tersendiri dari pemerintah, akan tetapi pada kenyataannya realita tidak selalu sesuai dengan yang terjadi di lapangan, seperti pernyataan berikut:

“Contoh yang kedua terkait tenaga kerja: Kalau dulu tenaga kerja, tidak ada yang namanya kuota 2% untuk difabel. Ditolak-tolak saja. Sekarang sistem mulai diterima dengan adanya kuota. Tapi pun adanya kuota itu tidak menjamin adanya rekrutmen”⁷⁰

“contohnya misalnya terkait dengan 1% itu, hari ini kalau kita ngomong ya misalnya dibandingkan dengan jumlah pegawai Jember yang ribuan dengan jumlah disabilitas yang ada di situ ya jauh, mungkin hanya misalnya Jember itu ada 4000 lebih mungkin disabilitas yang sekarang di instansi pemerintah mungkin tidak

⁶⁹ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

⁷⁰ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

sampai 10 orang. Masih jauh sekali, kemudian terkait dengan swasta itu ya jauh banget”⁷¹

Pernyataan di atas menyebutkan bahwa walaupun sudah ada kebijakan terkait hak kuota kerja bagi para penyandang disabilitas, akan tetapi itu tidak menjamin para difabel untuk bisa mendapatkan kuota tersebut dengan mudah, seperti dengan hasil wawancara dari salah satu penyandang disabilitas di bawah ini:

“biasa SDM dari temen-temen disabilitas ini yang nggak bisa memenuhi kuota dari lowongan kerja. Dulu itu pernah ada lowongan kerja, minimal kan kebanyakan SI ya, sedangkan temen-temen ini ada yang nggak lulus SMP, ada yang nggak lulus SD, ada yang nggak pernah sekolah sama sekali”⁷²

Hasil pernyataan di atas menyebutkan bahwa sebab penyandang disabilitas kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan ialah karena mereka tidak dapat memenuhi kualifikasi kuota kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dan itu disebabkan karena faktor SDM yang masih rendah.

- d. Bentuk hambatan pemenuhan perlindungan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember

Hambatan dalam pemenuhan hak perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember ialah bentuk kurangnya

⁷¹ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

⁷² Ari Nugroho, Anggota Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025.

kesadaran masyarakat lain akan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, seperti pernyataan berikut ini:

“Saya memang tidak pernah melakukan penelitian secara eksplisit terkait ini. Tapi dari indikator-indikator yang saya lihat, contoh misalnya tempat parkir-tempat parkir yang sudah dibuat oleh Pemkab untuk difabel, itu banyak yang ditempati orang-orang yang non difabel. Artinya mereka kan belum punya awareness terhadap disabilitas. Itu indikator yang saya lihat. Kemudian ketika ada disabilitas, misalnya contoh ada tunanetra menyebrang jalan, para pengguna jalan yang lain takkan ada yang peduli. Jadi memang PR kita dalam memberikan edukasi kepada masyarakat itu”⁷³

Pernyataan dari pendiri sekaligus Dewan Pertimbangan Perpenca di atas juga didukung oleh pernyataan dari salah satu penyandang disabilitas yang juga tergabung dalam Perpenca Jember:

“ya sebenarnya masyarakat itu tidak menyadari sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh disabilitas. Dan disabilitas juga kadang tidak mau menuntut, diem aja gitu. Ya termasuk perangkat desa ya nggak tau juga gitu. Jadi serba gimana gitu kan. Makanya sekarang mau didirikan komisi daerah disabilitas kan, sebagai perangkat yang menjelaskan terkait disabilitas”⁷⁴

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak-hak para penyandang disabilitas ternyata masih sangat minim. Hal ini tentunya akan membuat para penyandang disabilitas di Jember cenderung mendapatkan dampak negatif dari hak-hak yang seharusnya didapat akan tetapi malah disalah gunakan oleh orang lain. Oleh sebab itu, para difabel ini sangat memerlukan perlindungan sosial

⁷³ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

⁷⁴ Ahmad Yasin, Anggota Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025

baik itu dari pemerintah, swasta, ataupun dari lingkungan tempat mereka tinggal.

2. Strategi Perpenca Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember

a. Perumusan strategi

Perumusan strategi ialah salah satu tahapan yang melibatkan pemilihan langkah-langkah utama dalam rangka mewujudkan visi organisasi. Dalam hal ini, yang menjadi visi Perpenca adalah tercapainya kesetaraan, pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan pada wawancara bersama dengan pendiri yang dalam hal ini sekaligus menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, berikut akan dijabarkan data terkait bagaimana Perpenca melakukan perumusan strategi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember:

“Jadi gini, di Perpenca itu ada dua macam rapat. Ada rapat tiga bulanan sama rapat tahunan. Biasanya di rapat-rapat itulah kita nanti mendiskusikan permasalahan-permasalahan itu. Jadi itu kita angkat sebagai need assessment-nya. Apa sih permasalahan yang ada, solusinya apa, dan bagaimana teknis melakukan solusi itu. Contoh sederhana, karena kita sadar bahwa masalah terbesar difabel saat itu ya adalah SDM. Maka kita buat program yang pertama, pengentasan difabel yang tidak lulus SMP dan SMA, lalu program kejar paket ABC. Setelah itu kita lanjut program untuk mereka kuliah mendapatkan beasiswa di kampus ini. Itu juga bagian dari strategi”

“Kita itu memang tidak punya program. Karena program itu kan butuh pendanaan. Yang biasanya kita lakukan itu awalnya ya need assessment dulu. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh teman-

teman sekarang? Misalnya, oh sekarang lagi trendnya e-commerce. Oh, ayo kita coba mengajukan pelatihan e-commerce. Langkah pertama yang kita lakukan sebelum kita melakukan secara mandiri, kita coba untuk bermitra. Mau enggak untuk bermitra dengan kita dalam konteks pelatihan ini’’⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa untuk dapat mewujudkan visi yang melibatkan terpenuhinya kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, Perpenca memiliki sebuah strategi yang dirumuskan melalui *need assessment* yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. *Need assessment* tersebut didapatkan melalui hasil aduan terkait permasalahan-permasalahan disabilitas yang didiskusikan dalam rapat rutin setiap tiga bulan sekali dan juga rapat tahunan yang dilaksanakan oleh Perpenca.

b. Implementasi strategi

Implementasi strategi ialah upaya merealisasikan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan data tentang perumusan strategi Perpenca yang ternyata dilakukan dengan menggunakan *need assessment*, itu berarti bahwa implementasi strategi yang dilakukan oleh Perpenca pun disesuaikan pada permasalahan-permasalahan pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Berikut akan dijabarkan data-data terkait pelaksanaan strategi Perpenca Jember:

⁷⁵ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

1) Rehabilitas sosial

Bentuk hambatan dalam pemenuhan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Jember diantaranya adalah masih beredarnya stigma negatif di masyarakat terhadap para penyandang disabilitas, yang akhirnya dengan adanya stigma tersebut turut berpengaruh pada penerimaan keluarga yang cenderung menutupi keberadaan anggota keluarganya yang disabilitas. Dari permasalahan tersebut membuat penyandang disabilitas merasa kesulitan untuk melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, karena akhirnya mereka mengalami kesulitan untuk mengakses dunia luar. Berikut akan dijabarkan data hasil wawancara yang membahas bagaimana strategi yang dilakukan Perpenca untuk menangani hal tersebut:

“Jadi strategi kita waktu itu kita melakukan touring secara fisik ya. Touring secara fisik untuk memungkinkan setidaknya waktu itu setiap kecamatan itu kita punya satu anggota. Satu anggota difabel yang kita rekrut untuk bergabung. Harapannya satu anggota itu nanti bisa ketok tulus pada teman-temannya yang ada di kecamatan itu. Setelah mereka punya komunitas masing-masing, maka secara struktural Perpenca kita bentuk yang namanya perwakilan kecamatan dan ada lagi di bawahnya yaitu perwakilan desa”⁷⁶

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa strategi awal yang bisa dilakukan Perpenca untuk membantu penyandang disabilitas di Jember agar bisa melaksanakan fungsi sosialnya dengan optimal

⁷⁶ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

adalah dengan membentuk perwakilan kecamatan dan perwakilan desa, yang tujuannya agar bisa menjangkau para penyandang disabilitas yang berada di daerah-daerah kurang terjangkau.

“Kita biasanya ada kegiatan tiap bulan, bentuknya berupa arisan. Itu kita mengunjungi penyandang disabilitas ya seringnya sekitar 30 orang tiap bulan. Kegiatan itu pertama untuk memberi motivasi, mungkin ada teman-teman disabilitas yang dia masih selama ini masih masih terisolasi dan belum berani, lalu nanti ada motivasi, Oh berarti saya dengan kondisi seperti ini harus berpendidikan, saya kalau butuh skill harus ada kesadaran dari diri sendiri gitu, ya terutama itu. Kedua dari orang tua yang mungkin masih malu, ini loh ada contoh disabilitas yang bisa berhasil karena dia sekolah atau mungkin dia kerja”⁷⁷

Langkah berikutnya setelah membentuk perwakilan kecamatan dan perwakilan desa, ternyata Perpenca juga memiliki strategi untuk mengadakan kegiatan arisan untuk para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yang bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan saling memberikan motivasi bagi satu sama lain, seperti pernyataan dari hasil wawancara dengan ketua Perpenca berikut ini:

“kita tetep memberi motivasi, sosialisasi, contohnya di pemilu kemarin ya hampir teman-teman itu terlibat, contohnya saya terlibat di TPS, juga ada teman-teman dia juga terlibat sebagai KPPS, terus ada yang terlibat di pengawas pemilu. Jadi itu kan otomatis dia berinteraksi dengan pemerintah setempat ya, mungkin bisa mungkin Kecamatan, itu mereka sudah sudah terbiasa, walaupun ada itu kan itu teman-teman yang banyak itu ya, Itu nanti ya mengajak kepada temen-temen yang lain, misalnya bahkan di daerah panti itu ya saya memang meminta untuk teman-teman bisa mengajak ya, pertama itu memberi

⁷⁷ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

motivasi kepada teman-teman, kedua juga juga memberi pekerjaan bagi mereka, dan itu ya tidak mudah mengajak mereka itu”⁷⁸

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas itu akan membantu mereka lebih bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, salah satu contohnya yaitu tidak lagi meragukan diri sendiri dan turut berpartisipasi pada kegiatan yang sedang berlangsung di masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

2) Jaminan sosial

Bentuk hambatan pemenuhan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember diantaranya adalah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena kurangnya dukungan orang tua yang menyebabkan mereka tidak terdata dalam KK atau adminduk, sehingga itu menyebabkan para penyandang disabilitas ini kesulitan untuk mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, maupun layanan yang lain. Berikut akan dijabarkan strategi Perpenca dalam menangani permasalahan tersebut:

“Jadi kita ini ada namanya perwakilan Kecamatan ya, jadi itu memang fungsinya adalah bagaimana program-program yang ada ya, baik itu program dari pemerintah atau mungkin kita punya program terkait disabilitas itu bisa menjangkau kepada teman-teman disabilitas sampai ke pelosok desa. Itu jadi ada beberapa kecamatan yang itu kita belum ada perwakilan ya,

⁷⁸ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

seperti Kecamatan Jelbuk itu kita belum ada, karena dulu pernah ada tapi orangnya meninggal. Biasanya kita siasati dengan cara dari teman yang terdekat, misalnya kalau di Jelbuk itu ada teman di Arjasa itu biasanya kalau misalnya ada teman disabilitas yang lagi butuh difasilitasi baik itu terkait dengan adminduk atau mungkin alat untuk kesehatan seperti kruk dan kursi roda biasanya bisa kita minta untuk di data pada teman yang terdekat. ya itu tadi biasanya kalau ada yang seperti itu tidak terdata di adminduk ya kita melakukan edukasi ya, biasanya ada kita kalau ada kegiatan, mereka kita libatkan, sehingga ada kesadaran bahwa misalnya terkait adminduk itu sangat penting”⁷⁹

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa strategi Perpenca untuk mengatasi permasalahan penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, maupun yang lain dikarenakan tidak terdata dalam adminduk yaitu disiasati dengan mendata siapa saja penyandang disabilitas yang membutuhkan fasilitas yang berkaitan melalui perwakilan kecamatan/desa, untuk kemudian mereka akan dilibatkan dalam suatu kegiatan dan diberikan edukasi bahwa sangat penting bagi setiap warga negara untuk memiliki identitas dan terdata dalam adminduk. Selain itu, Perpenca juga bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendata kebutuhan penyandang disabilitas terkait alat-alat bantu penunjang mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti pernyataan berikut:

“gini biasanya Dinsos punya program terkait itu ya, mungkin dia minta bantuan saya dan saya share di grup, baru kemudian mereka mengajukan sesuai dengan kriteria diminta oleh

⁷⁹ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

pemerintah, misalnya terkait dengan pemberian Tossa itu pada teman teman yang membutuhkan, misalnya teman itu melijo atau mungkin jual sayur atau diberikan kepada mereka yang memang kriteria nya pertama dia masuk di daftar disabilitas yang tidak mampu. Kalau yang kaki palsu itu biasanya mereka yang membutuhkan, kaki palsu itu setiap tahunan ada beberapa yang mendapat. kalau kruk itu biasanya setelah saya di share grup mereka mengajukan dan saya ajukan ke pemerintah, terus biasanya dianter gitu ya”⁸⁰

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa Perpenca dalam strateginya untuk membantu penyandang disabilitas di Jember adalah dengan berperan dalam melakukan pendataan terkait siapa saja yang membutuhkan fasilitas penunjang untuk nantinya disetorkan kepada pemerintah.

Bentuk hambatan pemenuhan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember selanjutnya ialah terkait kurangnya perhatian dari *stakeholder* yang dalam hal ini adalah pemerintah desa dan masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas. Masih terdapat pihak-pihak yang berwenang ternyata dalam menjalankan tugasnya masih kurang memperhatikan disabilitas, contohnya dalam hal ini adalah pegawai pemerintah desa yang tidak memiliki data penyandang disabilitas yang ada di desanya, sehingga hal tersebut membuat penyandang disabilitas kurang diperhatikan dalam

⁸⁰ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

pemenuhan kesejahteraan sosial. Untuk itu, berikut akan disajikan strategi Perpenca dalam menangani permasalahan tersebut:

“Biasanya langkah yang kita lakukan adalah pendekatan persuasif, komunikatif, dengan kita mungkin memberikan komunikasi kepada perwakilan desa maupun kecamatan untuk melakukan pendekatan-pendekatan, penyampaian dan sebagainya. Itu yang kita lakukan”⁸¹

“Ya kita di pemerintah itu kita dilibatkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan, itu kita terlibat di Musrenbang tingkat desa, kemudian Musrenbang Kecamatan juga kita dilibatkan, dan sampai Musrenbang tingkat kabupaten kita terlibat. Dari kegiatan itu kan usulan bisa kita sampaikan, mungkin di desa itu. Jadi ada beberapa desa yang mereka memang teman-teman itu ada pemberdayaannya. Misalnya kayak Desa Arjasa itu tiap tahun ada pelatihan untuk teman-teman Disabilitas. Kemudian di saya kapan hari di desa mana ya, di Semboro itu dia juga ada semacam apa ya mungkin kalau dikatakan modal bagaimana itu bagaimana teman-teman itu dikelompokkan kemudian ada usaha bersama gitu. Jadi hasil dari perlibatan di Musrenbang itu akhirnya mungkin ada usulan dari temen-temen”⁸²

Hasil wawancara di atas dilakukan bersama ketua dan pendiri Perpenca. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam menangani permasalahan kurangnya perhatian dari stakeholder ialah dengan terlibat dalam musyawarah bersama untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan dari penyandang disabilitas itu sendiri.

⁸¹ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

⁸² Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

Hambatan dalam pemenuhan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas tidak berhenti di kurangnya akses bantuan sosial dan layanan kesehatan saja. Akan tetapi, penyandang disabilitas di Kabupaten Jember juga mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal. Hambatan ini disebabkan karena faktor jumlah SLB yang kurang, jarak SLB yang kebanyakan hanya berada di lingkungan kota dan jauh dari penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di Desa, dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi yang pas-pasan, serta kurangnya kesadaran keluarga akan pentingnya pendidikan bagi sang anak. Setelah melakukan wawancara bersama ketua Perpenca Jember, berikut akan dijabarkan terkait strategi yang dimiliki Perpenca:

“Kalau sekarang kesadaran tentang itu sudah ada ya, misalnya ada orang tuanya seperti itu kita kasih contoh yang baik-baik, agar keluarga itu tidak menutup untuk Disabilitas itu muncul, ya seperti yang saya ceritakan tadi. Itu kita bisa memberikan motivasi kepada keluarga. ‘Kalau memang kasihan nih ini contohnya kalau jenengan kan tidak mungkin bisa menemani anak ini sampai tua, pasti nanti jenengan meninggal, apa ketika jenengan tinggal anak ini dalam kondisi dia belum mandiri ya bagaimana? Apakah ada jaminan keluarga bisa menerima itu?’ Itu bisa mengirimkan motivasi orang tua untuk mengizinkan, karena kalau namanya jenengan kasihan, jenengan harus support kan bisa terkait dengan pendidikannya, mungkin terkait dengan keterampilannya, banyak sudah program pemerintah. Tapi kadang kan orang tua enggan untuk mengizinkan”⁸³

⁸³ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

Hasil wawancara bersama ketua Perpenca di atas menunjukkan strategi Perpenca untuk menumbuhkan kesadaran keluarga akan hak anaknya yang disabilitas adalah dengan pemberian edukasi dan motivasi akan kehidupan anak di masa tua nanti, hal ini bertujuan agar para orang tua atau keluarga lebih bisa peduli akan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk bisa hidup mandiri.

3) Pemberdayaan sosial

Bentuk hambatan pemenuhan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember diantaranya adalah kenyataan penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dikarenakan SDM yang masih rendah karena minim keterampilan dan jenjang pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi lowongan pekerjaan yang sedang dibuka. Berikut akan dijabarkan strategi Perpenca dalam mengatasi permasalahan tersebut:

“kita ada program kejar paket itu bagi teman-teman yang mungkin dulu belum pernah sekolah, atau mungkin pernah sekolah tapi ada bullying, akhirnya dia berhenti dulu. Kemudian juga mungkin karena dulu dia tidak ada motivasi buat apa kita sekolah, mau jadi apa, tapi hari ini karena mungkin program pemerintah terkait disabilitas itu sekarang sudah banyak, sehingga mereka ada keinginan untuk sekolah, ingin kuliah gitu, dan akhirnya kita ada program kejar paket A, B, dan C, dan itu peminatnya banyak ya, saya bisa mengetahui banyak itu kejar paket ABC itu mungkin jumlahnya ada ratusan untuk teman-teman”⁸⁴

⁸⁴ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

Hasil wawancara di atas bersama ketua Perpenca Jember tentang strategi pemberdayaan sosial penyandang disabilitas melalui program kejar paket bagi yang tidak memiliki ijazah ini diperkuat dengan data hasil wawancara bersama pendiri sekaligus dewan pertimbangan Perpenca Jember, sebagai berikut:

“Kalau kita di akhir-akhir ini memang lebih fokus kepada program kejar paket dan kuliah. Dan program pelatihan komputer. Kita ke situ ya. Karena memang orientasinya agar mereka ya melek teknologi di era teknologi. Dan itu sampai sekarang masih berjalan prosesnya”⁸⁵

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini Perpenca masih fokus dalam pengembangan SDM para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember dengan pengentasan pendidikan bagi para difabel yang belum memiliki ijazah sekolah melalui program kejar paker A, B, dan C. Selain itu, Perpenca juga memiliki program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan para difabel:

“Lalu bagaimana teman-teman itu yang mungkin dia ingin punya skill keterampilan ya kita hubungkan dengan BLK Jember. kita ada latihan itu tiap tahun ada beberapa programnya biasanya jahit, bordir, kemudian batik gitu ya”

“Yang jelas kalau pelatihan itu terus ya. Kemarin itu kita mengadakan 5 pelatihan yang waktu dalam rangka hari Disabilitas Internasional. Itu kita mengadakan pelatihan cukur rambut, kemudian kemarin juga ada jahit, digital marketing, kemudian ada apa ya, terus jelas kaya kejar paket itu terus”⁸⁶

⁸⁵ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

⁸⁶ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

Hasil wawancara bersama ketua Perpenca Jember di atas menunjukkan bahwa strategi meningkatkan SDM para penyandang disabilitas di Jember selain dengan cara mengentaskan pendidikan, tetapi juga dengan memberikan pelatihan-pelatihan sebagai bekal keterampilan untuk para difabel mendapatkan pekerjaan ataupun mendirikan usaha mandiri. Pelatihan-pelatihan yang diadakan tersebut disesuaikan dengan minat dan kebutuhan para penyandang disabilitas. Perpenca dalam merealisasikan program pelatihan dan pemberdayaan ini tidak selalu berdiri sendiri, kerap kali Perpenca memiliki kerjasama dengan lembaga lain, seperti pernyataan ketua Perpenca berikut ini:

“Jadi saat ini kita lagi menjalankan program dari Sigap ya, dia adalah lembaga yang saat ini juga konsen dengan itu, misalnya itu tadi yang mungkin nanti yang akan datang itu yang saya berikan tadi, jadi bagaimana itu bisa membantu terkait dengan pembiayaan anggaran yang seperti kita mengadakan nanti insya Allah tadi jalannya ke di Astton, itu kan juga dari itu mereka support anggaran, support juga mungkin kayak narasumber atau apa, dan itu pertama tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas politik organisasi Perpenca, nanti mungkin yang kita libatkan 30 orang itu dari pertama ada perwakilan teman-teman di kecamatan itu, terus kita juga tiap tahun kita juga ada kerjasama dengan BLK Jember, kemudian dengan Unej itu kita juga sering berinteraksi terkait dengan teman-teman yang kita pernah diundang itu untuk melihat mereka akan membuka perpustakaan ya, jadi melihat aksesibilitasnya bagaimana, kemudian juga kita pernah itu ya kita intinya adalah kita membuka diri dengan semua lembaga, karena kalau kita ngomong disabilitas ini kita tidak bisa sendiri, untuk mengadvokasi kepada pemerintah kita juga perlu bekerja

sama dengan banyak orang, banyak lembaga. Intinya kita terbuka dengan siapapun”⁸⁷

Hasil wawancara tentang strategi Perpenca melakukan kerjasama dengan banyak lembaga di atas ternyata tidak hanya dalam menjalankan program pelatihan saja, akan tetapi juga untuk kepentingan penyandang disabilitas yang lain, khususnya dalam mengadvokasi banyak pihak terkait hak-hak penyandang disabilitas.

4) Perlindungan sosial

Bentuk hambatan pemenuhan perlindungan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas. Berikut akan dijabarkan strategi Perpenca dalam menangani permasalahan tersebut:

“Yang jelas gini ya, kalau kita itu dulu kita juga sama-sama yang merintis kita punya perda ya, jadi perda itu kita usulkan mulai 2003. Karena kita sadar tanpa ada perda ini perlindungannya dapat berubah tiap ganti bupati, tapi dengan adanya perda itu kan sudah Bupatiya siapapun kan bisa advokasi”⁸⁸

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Perpenca sudah berhasil membuat Perda khusus untuk penyandang disabilitas di

⁸⁷ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

⁸⁸ Moh. Zaenuri Rofi'i, Ketua Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

Kabupaten Jember. Tujuan dari adanya Perda ini tidak lain adalah untuk mengamankan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember dari segala situasi.

“Kita sering melakukan hearing ya. Hearing dengan DPR, hearing dengan Bupati. Ini tentunya yang selama ini kita lakukan. Tapi kan kembali kepada kebijakan dari si pengambil keputusan ini lah ya. Jadi itu tidak ada upaya lain selain hearing karena dengan hearing kan kita mengkomunikasikan permasalahan dan sebagainya”⁸⁹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa walaupun sudah memiliki Perda sendiri, Perpenca tetapi memiliki dan melakukan upaya lain untuk memperjuangkan hak-hak para difabel di Jember, upaya itu ialah dengan melakukan hearing bersama pemerintah setempat untuk setiap kebutuhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

c. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi dilakukan untuk memantau dan menilai kinerja program yang telah dilaksanakan. Berikut akan dijabarkan mengenai evaluasi strategi yang dilakukan Perpenca dalam memantau dan menilai program yang dimiliki:

“Biasanya baru kita lakukan evaluasi itu kalau ada kendala yang sangat berarti. Yang itu benar-benar dapat menghambat program yang berjalan”⁹⁰

⁸⁹ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

⁹⁰ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

Hasil wawancara bersama Bapak Mais selaku pendiri Perpenca di atas menunjukkan bahwa Perpenca akan melakukan sebuah evaluasi ketika di rasa ada masalah yang cukup menghambat jalannya program yang sedang berlangsung.

“kalau dari strategi yang sudah kami lakukan kemarin itu ya ada perkembangan, tapi perkembangannya itu tidak signifikan. Contoh simpel. Kita ngomong konteks Jember. Pembangunan alun-alun Jember. Kalau ditanya akses atau tidak? Kalau saya mengatakan sebagian akses, sebagian tidak. Karena memang di depan sendiri ada ramp untuk naik ke alun-alun. Tapi kamar mandi untuk disabilitas tidak disediakan. Artinya penyediaan aksesibilitas itu masih juga belum optimal. Terus yang kedua terkait dengan non-fisik. Non-fisik ini kan bisa berupa kebijakan dan sebagainya. Itu pun juga belum tercover dengan baik. Contoh simple adanya biasiswa Pemkab. Kemarin tidak ada alokasi khusus biasiswa Pemkab untuk penyandang disabilitas. Jadi itu contoh-contoh konkret. Termasuk penerimaan PNS dan sebagainya. Bahkan bisa, kalau di Jember ada job market fair, tapi tidak ada job market fair yang mau menerima, membuka lowongan untuk difabel disitu. Jadi masih belum optimal. Jadi memang PR kita dalam memberikan edukasi kepada pemerintah maupun masyarakat itu masih harus lebih lagi untuk mengadvokasinya”⁹¹

Pernyataan dari Bapak Mais di atas menunjukkan bahwa terkait evaluasi untuk strategi yang telah dilakukan Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember itu berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran hak-hak penyandang disabilitas baik dari pemerintah maupun masyarakat umum. Sudah ada perkembangan akan tetapi masih belum optimal, sehingga itu

⁹¹ Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

membuat Perpenca harus lebih ekstra lagi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat umum yang lain baik terkait aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

Selain dari evaluasi tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Mais didapati bahwa untuk sekarang Perpenca juga memiliki sebuah impian yang termasuk dalam rencana jangka panjang Perpenca untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, sebagai berikut:

“Ini Perpenca ini kan sekarang juga berkembang tidak hanya LSM standar. Tapi kita juga sekarang punya yayasan. Yayasan Jember Advokasi Disabilitas. Yang ini yang harapan kita nanti yayasan ini juga nanti bisa mendirikan cikal bakal sekolah-sekolah. Yang harapannya nanti kita bisa menampung anak-anak disabilitas supaya bisa sekolah. Jadi dengan memanfaatkan teman-teman difabel itu sebagai gurunya. Sehingga dari difabel untuk difabel ini gambaran jangka panjang kita”⁹²

C. Pembahasan Temuan

Setelah berbagai data terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk melengkapi proses penulisan, data tersebut kemudian dianalisis dalam bagian pembahasan temuan. Pada tahap ini, dibahas gagasan-gagasan dari peneliti, keterkaitan antara dimensi dan kategori, perbandingan hasil penelitian dengan studi sebelumnya, serta penjabaran dan interpretasi temuan lapangan yang dapat ditelusuri lebih lanjut.

⁹² Asrorul Mais, Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 April 2025

Pembahasan temuan pada penelitian ini yaitu temuan-temuan yang ditemukan di lapangan dari hasil penelitian berjudul Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. Berikut data-data yang telah ditemukan di lapangan akan dibahas di bawah ini:

1. Bentuk Hambatan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember

Berdasarkan dari hasil penyajian data di atas, maka dapat diperoleh bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, baik itu dari aspek rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, ataupun perlindungan sosial yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang masih melekat

Data yang diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung menunjukkan bahwa salah satu penyebab pemenuhan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember belum optimal yaitu masih adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Maksud dari stigma negatif di sini ialah masih banyak didapati masyarakat yang memandang dan menganggap penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak mampu dan patut untuk dikasihani. Beberapa contoh dari adanya stigma negatif ini

diantaranya adalah tidak dipercaya dalam melakukan suatu hal secara mandiri, diragukan bahkan mengalami diskriminasi di dunia pekerjaan seperti sulitnya lowongan kerja yang benar-benar menerima penyandang disabilitas, dan dihindari karena dianggap sebagai beban.

Adanya stigma tersebut membuat para penyandang disabilitas kesulitan untuk berkembang karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka juga manusia yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang seperti manusia yang lain walaupun dengan menggunakan cara yang berbeda karena keterbatasan yang dimiliki. Dampak lainnya dari adanya stigma ini juga membuat penyandang disabilitas berakhir tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, seperti tidak dapat berinteraksi dan berbaur dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hasil ini sesuai dengan pernyataan dari Nurul Syobah dalam penelitiannya

"Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur" yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas cenderung terkucilkan karena dianggap kurang memiliki potensi untuk berkembang selayaknya individu-individu lain.⁹³

2) Dukungan dan penerimaan keluarga yang masih kurang

Bentuk hambatan selanjutnya yakni terkait kurangnya dukungan dan penerimaan keluarga terhadap penyandang disabilitas. Pada

⁹³ Syobah, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur."

kenyataannya, stigma negatif yang beredar di masyarakat terkait penyandang disabilitas ini juga bisa berasal dari dalam keluarga itu sendiri. Sering kali ditemui sebuah keluarga yang memiliki anggota disabilitas di dalam keluarganya berusaha untuk menutupi keberadaan dari penyandang disabilitas ini, hal ini dilakukan karena mereka malu dan menganggap kehadiran penyandang disabilitas di dalam keluarganya sebagai aib yang patut untuk disembunyikan. Dari permasalahan tersebut membuat penyandang disabilitas tidak memiliki kartu identitas karena tidak dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK) dan tidak terdaftar dalam adminduk. Hal ini juga terus berimbas pada sulitnya mengakses layanan ataupun kebijakan-kebijakan yang dimiliki pemerintah untuk para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Contoh nyatanya yaitu, penyandang disabilitas yang tidak terdata dalam adminduk akan kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan karena tidak memiliki KTP dan tidak bisa mengurus BPJS kesehatan, lalu mereka juga kesulitan untuk mendapat bantuan sosial yang berasal dari pemerintah yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas.

Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan atau bahkan di bawah rata-rata juga menjadi permasalahan bagi penyandang disabilitas untuk bisa hidup secara sejahtera. Kondisi tersebut membuat para difabel tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, satu contohnya yaitu dengan kondisi ekonomi

yang rendah tersebut membuat masih ada dari mereka yang akhirnya tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik, sehingga hal itu menyebabkan para difabel ini kesulitan untuk mengembangkan diri. Hasil ini sesuai dengan pernyataan dari Hafsoh dan Desiderius dalam penelitiannya yang berjudul “Social Capital Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri di Kabupaten Tegal” yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 82 persen Penyandang Disabilitas di Dunia berada di negara berkembang yang hidup di bawah garis kemiskinan.⁹⁴

3) *Self-esteem* penyandang disabilitas yang cenderung rendah

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki hambatan di salah satu atau lebih fungsi tubuhnya, yang mana hal tersebut membuat para difabel ini juga akan mengalami kesulitan dalam menjalani beberapa kegiatan sehari-hari. Tidak cukup dengan hambatan yang dimiliki tersebut lalu ditambah dengan adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan kurangnya dukungan dari orang tua membuat penyandang disabilitas mengalami penurunan percaya diri. Hal ini menyebabkan para difabel ini cenderung memiliki *self-esteem* yang rendah dan berakhir membuat mereka meragukan diri sendiri, sehingga mereka akan

⁹⁴ Islam and Sudibyo, “Social Capital Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri Di Kabupaten Tegal.”

cenderung menarik diri dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang.

4) Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah

Berikutnya, bentuk hambatan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yaitu masih rendahnya SDM dari para penyandang disabilitas khususnya yang berada di pinggiran kota. Maksud dari rendahnya SDM ini menyangkut dari masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum tuntas atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sedari kecil. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, masalah yang berkaitan dengan pendidikan para difabel ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak bagus menyebabkan para difabel ini tidak bisa bersekolah. Selanjutnya jarak SLB yang jauh dari tempat tinggal membuat para difabel kesulitan mengakses pendidikan karena hambatan mobilitas.

Hal yang menyangkut rendahnya SDM penyandang disabilitas di Kabupaten Jember selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh para difabel. Sehingga imbas dari rendahnya SDM ini yaitu walaupun sudah ada kebijakan terkait kuota 1% dan 2 % bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan, tetapi pada akhirnya kebijakan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik karena selain adanya oknum yang tidak menjalankan kebijakan dengan benar,

juga banyak para difabel yang tidak dapat memenuhi kualifikasi dari perusahaan karena persyaratan minimal pendidikan yang tidak terpenuhi ataupun persyaratan yang lain. Hasil ini sesuai dengan pernyataan dari Nurul Syobah dalam penelitiannya "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur" yang menyebutkan bahwa diskriminasi bagi para penyandang disabilitas terjadi hampir pada semua aspek kehidupan, terutama pada bidang pendidikan dan bidang lapangan pekerjaan.⁹⁵

5) Kurangnya kesadaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas

Kurangnya kesadaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam hal ini bukan hanya berasal dari masyarakat umum saja, tetapi juga dari pemerintah atau pemangku kebijakan. Sudah terdapat banyak kebijakan yang menyangkut tentang penyandang disabilitas. Bahkan di Jember sendiri sudah ada Perda yang khusus mengatur tentang penyandang disabilitas dan hak-haknya. Akan tetapi pada kenyataannya, adanya kebijakan-kebijakan tersebut tidak menjamin penyandang disabilitas di Kabupaten Jember mendapatkan hak-haknya secara utuh.

Contohnya yaitu terkait aksesibilitas penyandang disabilitas, baik yang fisik maupun non fisik. Para difabel ini berhak untuk mendapatkan lingkungan yang aksesibel untuk menunjang kegiatan

⁹⁵ Syobah, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur."

mereka sehari-hari, yaitu seperti ketersediaan lift di bangunan-bangunan umum, *ramp* untuk pengguna kursi roda di ruang publik maupun bangunan-bangunan publik, parkir khusus disabilitas, dan hal-hal ramah disabilitas yang lain. Di Kabupaten Jember sendiri untuk saat ini sudah ada perkembangan terkait lingkungan yang aksesibel bagi disabilitas, akan tetapi lingkungan aksesibel yang menjadi hak para difabel ini pada kenyataannya banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak memiliki kesadaran terhadap hak para penyandang disabilitas, seperti contoh adanya parkir khusus untuk para disabilitas yang malah digunakan oleh kendaraan milik orang non disabilitas.

Selanjutnya yaitu terkait sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa mengakses SLB karena jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal. Walaupun kebijakan tentang sekolah inklusi di sekolah umum ini sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih ditemukan beberapa permasalahan seperti keterbatasan atau bahkan tidak adanya guru pendamping khusus disabilitas di setiap sekolah yang menyebabkan para difabel yang bersekolah di sekolah umum ini tidak bisa mendapatkan pendampingan dan metode belajar yang sesuai dengan kedisabilitasannya, sehingga mereka akan kesulitan untuk mencapai hasil belajar yang baik. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Dari Hafsoh dan Desiderius dalam penelitiannya yang berjudul “Social Capital Dalam Upaya Pemberdayaan

Penyandang Disabilitas Oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri di Kabupaten Tegal” yang menyebutkan bahwa sekitar 80 persen Penyandang Disabilitas di Indonesia mengalami tindakan diskriminasi, termasuk kecenderungan pengabaian aksesibilitas terhadap hak pelayanan dasar.⁹⁶

2. Strategi Perpenca Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember

Berdasarkan dari penyajian data tentang strategi Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember dapat diketahui bahwa dalam melakukan perencanaan atau perumusan strategi, Perpenca menggunakan metode *need assessment* untuk mengetahui kebutuhan atau permasalahan yang sedang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, yang kemudian hasil *need assessment* ini digunakan Perpenca dalam menentukan program-program yang akan dilaksanakan. Lalu tahap kedua yaitu terkait pelaksanaan strategi yang merupakan pelaksanaan program dari hasil *need assessment* yang telah disebutkan tadi. Kemudian tahap terakhir yaitu evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian akan program yang sedang atau telah berlangsung. Dalam hal evaluasi ini, Perpenca hanya akan melaksanakan

⁹⁶ Islam and Sudibyo, “Social Capital Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri Di Kabupaten Tegal.”

evaluasi ketika dirasa terdapat permasalahan yang benar-benar menjadi hambatan dalam pelaksanaan program yang telah dirumuskan.

Berdasarkan AD/ART, Perpenca memiliki beberapa upaya yang bisa dilaksanakan sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, diantaranya yaitu menggalang dan mengupayakan peningkatan potensi sumber daya dan sumber dana yang berasal dari pemerintah dan masyarakat, membina keakraban dan kekeluargaan antar anggota, masyarakat dan pemerintah, serta memperjuangkan lingkungan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.⁹⁷ Berikut akan dijabarkan lebih dalam mengenai strategi Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember sesuai dengan penyajian data yang telah diuraikan:

- 1) Mengupayakan peningkatan potensi sumber daya dan sumber dana
 - a. Program kejar paket A, B, dan C untuk pengentasan pendidikan

Melihat dari salah satu contoh bentuk hambatan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yaitu masih rendahnya SDM para difabel, maka dengan itu Perpenca memiliki sebuah program pendidikan non formal yang bekerjasama dengan PKBM Rumpun Aksara di Kecamatan Panti sebagai bentuk pengentasan pendidikan panyandang disabilitas di Jember, yaitu sebuah program kesetaraan berupa

⁹⁷ AD/ART PERPENCA, 25 April 2025

kejar paket A, B, dan C. Tujuan dari adanya program ini yaitu untuk membantu para difabel yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal agar bisa menyetarakan pendidikan dan mendapatkan ijazah sekolah yang biasanya dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapat pekerjaan.

Tidak hanya berhenti pada program kejar paket saja. Untuk selanjutnya Perpenca juga memiliki program lanjutan di perguruan tinggi yang bekerjasama dengan UNIPAR Jember. Program ini memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bisa menempuh pendidikan di bangku kuliah, khususnya di Program S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB). Dengan diadakannya program pengentasan pendidikan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas SDM para difabel di Kabupaten Jember sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi mereka. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Friedlander dan Apte yang dikutip dalam Fahrudin (2018), yaitu fungsi pengembangan untuk mendukung secara langsung maupun tidak langsung pada proses pengembangan sumber daya penyandang disabilitas.⁹⁸

⁹⁸ Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*.

b. Program pelatihan keterampilan

Salah satu indikator kesejahteraan sosial penyandang disabilitas ialah pemberdayaan sosial dalam bentuk pengembangan potensi yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri. Upaya yang dimiliki Perpenca untuk memenuhi hal tersebut ialah dengan mengadakan program pelatihan keterampilan kerja yang nantinya dapat menjadi bekal bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember untuk mencari pekerjaan ataupun membuka usaha secara mandiri. Pelatihan keterampilan kerja ini biasanya dilaksanakan dengan menggandeng lembaga yang bersedia untuk bekerjasama, seperti BLK Jember. Bentuk pelatihan yang diadakan biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan dari para difabel, beberapa contoh pelatihan yang telah dilaksanakan yaitu pelatihan computer yang bertujuan agar para difabel di Jember bisa lebih melek teknologi di era teknologi ini. Selain itu juga ada pelatihan jahit, bordir, batik, dan juga cukur rambut. Dari program pelatihan itu, diharapkan penyandang disabilitas di Jember memiliki skill tambahan yang dapat membantu mereka hidup secara mandiri. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Hafsoh dan Desiderius dalam penelitiannya "Social Capital Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Komunitas

Difabel Slawi Mandiri di Kabupaten Tegal" yang menyebutkan bahwa salah satu tahap pemberdayaan penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan proses memberikan potensi berupa kegiatan pelatihan untuk para penyandang disabilitas.⁹⁹

- 2) Membina keakraban dan kekeluargaan antar anggota penyandang disabilitas

Indikator kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berikutnya yaitu terkait rehabilitasi sosial, yang merupakan proses refungsional dalam membantu disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Strategi yang dilakukan Perpenca untuk bisa membantu penyandang disabilitas di Jember mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yaitu dengan melakukan komunikasi persuasif dan pemberian motivasi. Komunikasi persuasif yang dimaksud di sini ialah membantu mengkomunikasikan kepada keluarga penyandang disabilitas agar dapat lebih memberikan dukungan dan kesempatan kepada disabilitas untuk bisa berkembang, sehingga para difabel ini pun bisa memiliki kepercayaan diri yang lebih ketika berinteraksi maupun berkegiatan di kehidupan bermasyarakat.

⁹⁹ Islam and Sudibyo, "Social Capital Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri Di Kabupaten Tegal."

Kemudian yang kedua adalah pemberian motivasi melalui kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap bulan yang berbentuk arisan. Dalam kegiatan ini, para penyandang disabilitas yang terlibat aktif dalam Perpenca akan mengunjungi kediaman satu sama lain secara bergantian tiap bulannya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membina keakraban dan kekeluargaan antar anggota disabilitas, sehingga dengan itu akan membuat para penyandang disabilitas ini tidak merasa sendirian dalam menjalani hidup karena memiliki teman dengan kondisi atau hambatan yang sama. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang pemberian motivasi bagi satu sama lain agar mampu bangkit dan berkembang dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Hafsoh dan Desiderius dalam penelitiannya "Social Capital Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri di Kabupaten Tegal" yang menyebutkan bahwa pertemuan rutin yang dilakukan antar anggota penyandang disabilitas dilakukan untuk sharing-sharing terkait masalah, pelatihan, maupun pengalaman-pengalaman untuk membangun rasa peduli pada sesama.¹⁰⁰ Sehingga demikian dapat membuat para difabel di Jember memiliki pandangan hidup yang positif dan mampu untuk melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

¹⁰⁰ Islam and Sudiby.

3) Memperjuangkan lingkungan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas

a. Layanan informasi dan fasilitator

Indikator kesejahteraan sosial selanjutnya yaitu mengenai jaminan sosial untuk menjamin seluruh penyandang disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak. Untuk memenuhi indikator tersebut, di sini Perpenca dapat berperan menjadi fasilitator yang juga menyediakan layanan informasi bagi penyandang disabilitas di Jember. Layanan informasi yang dimaksud ialah dapat berupa informasi mengenai segala jenis bantuan sosial dari pemerintah, seperti contohnya Perpenca melakukan pendataan kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu untuk nanti disetorkan ke Dinas Sosial yang membantu menyediakan alat-alat bantu bagi para difabel di Jember. Selain itu, Perpenca juga biasa memiliki peran dalam membantu para difabel untuk mengakses layanan kesehatan maupun layanan pendidikan.

b. Edukasi dan advokasi kepada pemerintah dan masyarakat

Indikator terakhir bagi pemenuhan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yaitu terkait perlindungan sosial yang merupakan upaya untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar penyandang disabilitas dapat hidup sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Upaya ini

dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan advokasi kepada pemerintah dan masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dalam mewujudkan upaya itu, Perpenca sering melakukan *hearing* dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bupati Jember ketika dilibatkan dalam suatu musyawarah bersama. Tujuan *hearing* ini yaitu tidak lain adalah untuk memperjuangkan lingkungan yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas di Jember. Kebijakan mengenai hak penyandang disabilitas memang sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat oknum-oknum yang membuat pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak terpenuhi secara optimal. Oleh sebab itu, Perpenca akan lebih gencar memberikan edukasi dan advokasi agar penyandang disabilitas di Kabupaten Jember dapat hidup dan beraktivitas sesuai dengan masyarakat umum yang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan temuan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diberikan:

1. Hambatan pemenuhan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember adalah masih adanya stigma negatif di masyarakat terhadap penyandang disabilitas, kurangnya dukungan dan penerimaan keluarga, *self-esteem* penyandang disabilitas cenderung rendah, SDM penyandang disabilitas masih rendah, dan kurangnya kesadaran masyarakat maupun pemerintah terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
2. Strategi Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember adalah diawali dengan *need assessment*, mengupayakan peningkatan potensi sumber daya dan sumber dana (program kejar paket A, B, dan C dan program pelatihan keterampilan kerja), membina keakraban dan kekeluargaan antar anggota penyandang disabilitas (komunikasi persuasif dan pemberian motivasi pada kegiatan arisan rutin setiap bulannya), serta memperjuangkan lingkungan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (menyediakan layanan informasi dan edukasi serta advokasi kepada pemerintah dan masyarakat).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Perpenca Jember

Sebagai komunitas disabilitas yang paling besar di Kabupaten Jember, Perpenca berperan sebagai pen jembatan antara penyandang disabilitas dengan pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya Perpenca diharapkan terus konsisten dalam menjalankan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

2. Bagi Masyarakat Umum

Penyandang disabilitas merupakan manusia yang juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan masyarakat umum lainnya. Oleh sebab itu, diharapkan masyarakat umum agar lebih peka dan sadar akan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas agar mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup dengan sejahtera.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah semoga bisa mengembangkan dan melengkapi kekurangan dalam penelitian ini yaitu menggali informasi lebih dalam mengenai efektivitas strategi yang dimiliki Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama, 2018.
- Akdon. *Strategic Management for Educational Management*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Annisa. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD 1945." fahum.ac.id, 2023. bit.ly/3ApadBo.
- Arikunto, Suharsimi. *Organisasi Dan Administrasi Pendidikan, Teknologi, Dan Kejuruan*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- David, Fred R. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2014.
- Dzulhijjah, Jihan. "Tindakan Sosial Komunitas Kreatif Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Komunitas Kreatif Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan)." Universitas Sriwijaya, 2022.
- Effendy, and Onong Uchjana. *ILMU KOMUNIKASI (Teori Dan Praktek)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Fauzi, Muhammad, Awang Saputra, and Encep Syarifudin. "Konsep Kesejahteraan Sosial Lakatosian Dalam Perspektif Maqashid Shariah." *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2022): 175.
- Fauzy, Akhmad. *Metode Sampling*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2019.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ghafur, W.A. *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial*. Bantul: Samudra Biru, 2012.
- . *Kesejahteraan Sosial Dalam Al-Qur'an: Konsep Dan Paradigma*. Yogyakarta: Dakwah Press Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2014.
- Ghofur, Waryono Abdul. "Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *HIKMAH* VII, no. 1 (2011): 111.
- Harap, Febi. "Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kota Medan." Universitas Medan Area, 2022.
- Hasan, Muhammad, Tuti Khairani Harahap, Syahrial Hasibuan, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Cecep Ucu Rakhman, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Penerbit Tahta Media Group, 2022.
- Hidayat, Dede Rahmat. *Teori Dan Aplikasi Psikologi Kepribadian Dalam*

- Konseling*. Edited by Zaenudin A. Naufal. Cet. 2. Bogor, 2015.
- Hunger, David J., and Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis*. Edited by terj. Julianto Agung. Cet. 16. Yogyakarta: Andi, 2003.
- Irwanto. *A-Z Sindrom*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Islam, Hafsoh Labibatul, and Desiderius Priyo Sudiby. "Social Capital Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri Di Kabupaten Tegal." *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 3, no. 1 (2023).
- Ismail, Asep Usman. "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, no. 1 (2015): 45–47.
- jdih.kemenkeu.go.id. "UU RI No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial." Accessed November 1, 2024. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.htm>.
- Kementerian Sosial RI. *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*, 2021.
- Kusumadmo, E. *Manajemen Strategik Pengetahuan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Ni'matuzahroh, and Yuni Nurhamida. *Individu Berkebutuhan Khusus Dan Pendidikan Inklusif*. Malang: UMM Press, 2016.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 828–29.
- Purba, Elvis F., and Parulian Simanjutak. *Metode Penelitian*. Medan: Percetakan SADIA, 2012.
- Rosyadi, Dede. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 380–495.
- Sudarwati, Erlin. "Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan Dan Tni." Kemhan.go.id, 2016. <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html#:~:text=Upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian,dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 23rd ed. ALFABETA, 2016.
- Suharto, and Reni Jifhani. “Implementasi Kebijakan Dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022.” *SPEKTRUM* 21, no. 1 (2024): 71–72.
- Sukmasari, Dahlia. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Journal of Qur’an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2020): 2.
- Sukmasari, Dahliana. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Journal of Qur’an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2020): 3.
- Sururama, Febiola Zildjian, Marnan A. T. Mokorimban, and Prisilia F. Worung. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bitung Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat VII*, no. 5 (2016).
- Swadjaja, Isma, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Unti Ludigdo. “Model of Islamic Wealth Management Based on Maqasid Al-Shariah.” *Journal of Innovation in Business and Economics* 3, no. 02 (2019): 63–72.
- Syobah, Sy. Nurul. “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur.” *Nuansa* 15, no. 2 (2018): 252.
- Tripomo, Tedjo, and Udan. *Manajemen Strategi*. Bandung: Rekayasa Sains, 2005.
- Ulfah, Almira Keumala, Ramadhan Razali, Habibur Rahman, Abd Ghofur, Umar Bukhory, Sri Rizqi Wahyuningrum, MUhammad Yusup, Rita Inderawati, and Faqihul Muqoddam. *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, Dan Pengembangan)*. Madura: IAIN Madura Press, 2022.
- WIjaya, Ardhi. *Teknik Mengajar Siswa Tunagrahita (Disabilitas Intelegensi-Gangguan Intelektual)*. Yogyakarta: Kyta, 2013.
- Zahroh, Fatimatus. “Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas Dan Center Advokasi (Perpenca) Dalam Mensosialisasikan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Manda Rosa Yanti

NIM : 211103030009

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas Dan Center Advokasi (PERPENCA) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Mei 2025



The image shows a blue official stamp from Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER' and 'MEYOR TANDA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'MANDA ROSA YANTI' and the NIM number '211103030009' are printed.

Manda Rosa Yanti
NIM. 211103030009

B. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mularan No. 1 Mangli Kalwates Jember, Kode Pos 68136
email: fakultas.dakwah@uisu-jember.ac.id website: http://fakultas.dakwah.uisu-jember.ac.id



Nomor : BA 786 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 3 /2025 3 Maret 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.
Ketua Perpenca Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Manda Rosa Yanti
NIM : 211103030009
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas Dan Center Advokasi (PERPENCA) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,
Dr. Uun Yusufa, M.A.



C. Surat Selesai Penelitian



PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS & CENTER ADVOKASI (PERPENCA) JEMBER

SK Kemenkumham RI No. AHU-0072152.AH.01.07. Tanggal 29 Agustus 2016
Sekretariat: Jalan Imam Bonjol 164 Kaliwates Jember 68133
Phone: 085259696418; e-mail: perpenca@gmail.com

Berikan Kesempatan, Kami Akan Buktikan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 006/PPCJ/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Jember, menerangkan bahwa :

Nama : Manda Rosa Yanti
NIM : 211103030009
Tempat / Tgl. Lahir : Jember, 26 Juni 2003
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah UIN KH Achmad Siddiq Jember

mahasiswa tersebut benar-benar telah mengadakan Penelitian di Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Jember mulai tanggal 12 April 2025 s/d 20 Mei 2025 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 20 Mei 2025



MOH. ZULNURI ROFI'I, SE, S.Pd

D. Pedoman Kegiatan

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari, Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan
1.	03 Maret 2025	Konsultasi Judul Penelitian (konfirmasi)	
2.	11 April 2025	Mengantar surat ijin Penelitian	
3.	12 April 2025	Wawancara bersama ketua Perpensa	
4.	15 April 2025	Wawancara bersama Pardini Perpensa	
5.	16 April 2025	Wawancara bersama Bapak Ahmad Yasim	
6.	16 April 2025	Wawancara bersama Bapak Ari	
7.	20 Mei 2025	Meminta surat Keterangan Keluaran Penelitian	

Jember, 20 Mei2025

Mengetahui,
PERPENCA Jember


Moh. Zaenuri Rofi'i, SE., S.Pd.

E. Pedoman Wawancara

a) Pedoman Wawancara Pendiri Perpenca

a. Untuk mengetahui bentuk hambatan yang menyebabkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember belum terpenuhi:

- Rehabilitasi Sosial:
 - a) Bagaimana menurut anda kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - b) Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - c) Apakah selama ini penyandang disabilitas sudah mendapatkan pelayanan aksesibilitas yang baik dalam berkegiatan sehari-hari? (dalam hal ini yang dimaksud adalah penyediaan kemudahan seperti penataan lingkungan fisik maupun non fisik yang memadai)
 - d) Apakah penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat?
 - e) Apa yang biasanya menjadi hambatan penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan bersosial di masyarakat?
 - f) Apakah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember mendapatkan layanan rehabilitasi sosial?
 - g) Bagaimana Perpenca melihat peran keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial penyandang disabilitas?
- Jaminan Sosial:
 - a) Bagaimana kondisi pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan tempat tinggal) bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - b) Bagaimana akses penyandang disabilitas terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Jember?
 - c) Apa tantangan utama dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas?

- d) Bagaimana kondisi akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
- e) Bagaimana kondisi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
- f) Bagaimana akses penyandang disabilitas terhadap jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial, ataupun program lainnya?
- g) Apa kendala utama yang menyebabkan tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan jaminan sosial?
- Pemberdayaan Sosial:
 - a) Bagaimana peluang kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - b) Apa saja hambatan utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan atau mendirikan usaha mandiri?
 - c) Apakah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember mendapatkan program pelatihan atau pemberdayaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri?
- Perlindungan Sosial:
 - a) Apakah masih terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - b) Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas?
 - c) Apa saja hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan hukum dan perlindungan sosial?
 - d) Sejauh mana efektivitas regulasi atau kebijakan yang ada dalam melindungi hak penyandang disabilitas?

b. Untuk mengetahui strategi Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember:

- a) Apa yang melatarbelakangi berdirinya Perpenca? Dan apa yang menjadi visi dan misi utama dari komunitas ini?
- b) Apa saja tantangan yang dihadapi saat mendirikan Perpenca dulu?

- c) Program atau kegiatan apa saja yang dimiliki Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
- d) Apakah dalam menjalankan program yang dimiliki tersebut, Perpenca bekerjasama dengan pemerintah ataupun komunitas lain?
- e) Bagaimana Perpenca melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program atau kegiatan yang telah berlangsung?

b) Pedoman Wawancara Ketua Perpenca

a. Untuk mengetahui bentuk hambatan yang menyebabkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember belum terpenuhi:

- **Rehabilitasi Sosial:**
 - a) Bagaimana menurut anda kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - b) Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - c) Apakah selama ini penyandang disabilitas sudah mendapatkan pelayanan aksesibilitas yang baik dalam berkegiatan sehari-hari?
 - d) Apakah penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat?
 - e) Apa yang biasanya menjadi hambatan penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan bersosial di masyarakat?
 - f) Apakah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember mendapatkan layanan rehabilitasi sosial?
 - g) Bagaimana Perpenca melihat peran keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial penyandang disabilitas?
- **Jaminan Sosial:**
 - a) Bagaimana kondisi pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan tempat tinggal) bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?

- b) Bagaimana akses penyandang disabilitas terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Jember?
- c) Apa tantangan utama dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas?
- d) Bagaimana kondisi akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
- e) Bagaimana kondisi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
- f) Bagaimana akses penyandang disabilitas terhadap jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial, ataupun program lainnya?
- g) Apa kendala utama yang menyebabkan tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan jaminan sosial?
- Pemberdayaan Sosial:
 - a) Bagaimana peluang kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - b) Apa saja hambatan utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan atau mendirikan usaha mandiri?
 - c) Apakah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember mendapatkan program pelatihan atau pemberdayaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri?
- Perlindungan Sosial:
 - a) Apakah masih terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - b) Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas?
 - c) Apa saja hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan hukum dan perlindungan sosial?
 - d) Sejauh mana efektivitas regulasi atau kebijakan yang ada dalam melindungi hak penyandang disabilitas?

b. Untuk mengetahui strategi Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember:

- a) Sampai saat ini bagaimana Perpenca dikenal di masyarakat?
- b) Bagaimana cara Perpenca melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang ramah disabilitas?
- c) Strategi apa yang dimiliki Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
- d) Program apa saja yang dimiliki Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
- e) Apakah dalam menjalankan program yang dimiliki tersebut Perpenca bekerjasama dengan pemerintah ataupun komunitas lain?
- f) Apakah terdapat faktor penghambat dalam melaksanakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
- g) Bagaimana cara mendorong penyandang disabilitas yang tergabung sebagai anggota Perpenca Jember untuk turut aktif dalam mengikuti setiap program yang dimiliki oleh Perpenca?
- h) Menurut anda, apakah strategi yang selama ini digunakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember berjalan dengan baik?
- i) Bagaimana cara Perpenca melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan?
- j) Apa rencana jangka panjang Perpenca dalam mendukung kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?

c) Pedoman Wawancara Anggota Perpenca

a. Untuk mengetahui bentuk hambatan yang menyebabkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember belum terpenuhi:

- Rehabilitasi Sosial:
 - a) Bagaimana menurut anda kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?

- b) Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
- c) Apakah selama ini penyandang disabilitas sudah mendapatkan pelayanan aksesibilitas yang baik dalam berkegiatan sehari-hari?
- d) Apakah penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat?
- e) Apa yang biasanya menjadi hambatan penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan bersosial di masyarakat?
- f) Apakah anda pernah mengikuti layanan rehabilitasi sosial?
- g) Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh keluarga maupun orang di sekitar anda?
- Jaminan Sosial:
 - a) Bagaimana kondisi pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan tempat tinggal) bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - b) Bagaimana akses penyandang disabilitas terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Jember?
 - c) Bagaimana kondisi akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - d) Bagaimana kondisi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - e) Bagaimana akses penyandang disabilitas terhadap jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial, ataupun program lainnya?
- Pemberdayaan Sosial:
 - a) Bagaimana peluang kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
 - b) Apa saja hambatan utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan atau mendirikan usaha mandiri?

- c) Apakah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember mendapatkan program pelatihan atau pemberdayaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri?
- Perlindungan Sosial:
 - a) Apakah anda pernah mengalami diskriminasi dari orang di sekitar anda?
 - b) Menurut anda bagaimana tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas?
 - c) Apa saja hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan hukum dan perlindungan sosial?
 - d) Menurut anda sejauh mana efektivitas regulasi atau kebijakan yang ada dalam melindungi hak penyandang disabilitas?
 - b. Untuk mengetahui strategi Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember:**
 - a) Sudah berapa lama anda tergabung menjadi anggota Perpenca Jember?
 - b) Apakah anda aktif dalam mengikuti kegiatan atau program yang dimiliki Perpenca?
 - c) Apa yang anda rasakan selama bergabung dan turut aktif mengikuti kegiatan di Perpenca Jember?
 - d) Menurut anda, apakah strategi yang dimiliki oleh Perpenca dalam upaya meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember selama ini memiliki perubahan dan dampak positif terhadap kondisi kehidupan penyandang disabilitas?

F. Pedoman Observasi

NO	INDIKATOR	YA	TIDAK
1.	Rehabilitasi Sosial		
	a. Penyandang disabilitas terlibat aktif dalam kehidupan bersosial di masyarakat		

	b. Memiliki dukungan dan motivasi positif dari keluarga maupun masyarakat sekitar		
	c. Mengikuti layanan rehabilitasi sosial		
	d. Memiliki alat bantu sebagai penunjang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari		
2.	Jaminan Sosial		
	a. Kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik (sandang, pangan, dan tempat tinggal)		
	b. Dapat mengakses pendidikan dengan mudah		
	c. Dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah		
	d. Memiliki BPJS kesehatan, bantuan sosial, ataupun program yang lain		
3.	Pemberdayaan Sosial		
	a. Kondisi ekonomi baik		
	b. Memiliki pekerjaan atau usaha mandiri		
	c. Mengikuti pelatihan atau program pemberdayaan yang lain		
4.	Perlindungan Sosial		
	a. Dapat berinteraksi dengan baik bersama masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya		
	b. Penyandang disabilitas merasa aman dan terlindungi dalam kehidupan sosial di masyarakat		

G. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Bersama Ketua Perpenca

A.	Perpanca sampai saat ini tuh udah menjangkau sampai kemana aja pak untuk disabilitas di Kabupaten Jember?
B.	Jadi kita ini ada namanya perwakilan Kecamatan ya, jadi itu memang fungsinya adalah bagaimana program-program yang ada ya, baik itu program dari pemerintah atau mungkin kita punya program terkait disabilitas itu bisa menjangkau kepada teman-teman disabilitas sampai ke pelosok desa.
A.	Apakah ada kecamatan tertentu yang masih belum terjangkau?
B.	Itu jadi ada beberapa kecamatan yang itu kita belum ada perwakilan ya, seperti Kecamatan Jelbuk itu kita belum ada, karena dulu pernah ada tapi orangnya meninggal. Biasanya kita siasati dengan cara dari teman yang terdekat, misalnya kalau di Jelbuk itu ada teman di Arjasa itu biasanya kalau misalnya ada teman disabilitas yang lagi butuh difasilitasi baik itu terkait dengan adminduk atau mungkin alat untuk kesehatan seperti kruk dan kursi roda biasanya bisa kita minta untuk di data pada teman yang terdekat
A.	Kalau menurut Panjenengan terkait perbandingan dari disabilitas yang sudah mendapatkan pemberdayaan yang bagus dengan disabilitas yang belum mendapatkan pemberdayaan atau kayak kesejahteraan sosialnya itu masih kurang nih, itu perbandingannya gimana pak?
B.	Jadi gini ya, yang jelas dari jumlah data kita yang ada sekitar 10.000, mungkin yang aktif dan mungkin dia sering mengikuti program itu mungkin ada beberapa ya di ratusan lah ya, karena mungkin kendalanya ya tidak semuanya bisa kita jangkau kan ya memang hambatan Disabilitas itu adalah akses, ya mungkin akses informasi mungkin di keluarga itu tidak semuanya mereka dipublikasikan, bahkan saya dapat info dari beberapa temen itu ada yang sampe tidak dimasukkan di KK karena mungkin malu.

A.	Kalau kayak gitu kan kalau misalnya nggak dimasukkan ke dalam KK itu gimana pak caranya tau eksistensinya?
B.	Yang jelas gini ya, kalau misalnya dia sudah tidak masuk ke dalam KK ya tetap tentang akses dari pemerintah dia bakalan kesulitan, misalnya tentang adminduk terus terkait dengan bantuan-bantuan dari program pemerintah, misalnya PKH kemudian BPNT, sembako, itu jelas mereka tidak mungkin terlayani karena dia tidak masuk dalam database pemerintah.
A.	Berarti kalau kayak gitu dari perpanca sendiri juga kesulitan ya pak?
B.	Sangat kesulitan, ya itu tadi biasanya kalau ada yang seperti itu ya kita melakukan edukasi ya, biasanya ada kita kalau ada kegiatan, mereka kita libatkan, sehingga ada kesadaran bahwa misalnya terkait adminduk itu sangat penting, karena misalnya sekarang BPJS juga seperti mereka harus masuk di KK. Misalnya program-program yang di BPNT bahkan mungkin bantuan alat kesehatan, kruk dan lain-lain itu harus terdata dulu di adminduk
A.	Kalau untuk sosialisasi rutin itu apa ada nggih Pak?
B.	Kita biasanya ada kegiatan tiap bulan, bentuknya berupa arisan, mungkin nanti kalau ada kegiatan itu bisa kita undang. Jadi kita ada arisan ya, Itu kita mengunjungi penyandang disabilitas ya seringnya sekitar 30 orang tiap bulan. Kegiatan itu pertama untuk memberi motivasi, mungkin ada teman-teman disabilitas yang dia masih selama ini masih masih terisolasi dan belum berani, lalu nanti ada motivasi, Oh berarti saya dengan kondisi seperti ini harus berpendidikan, saya kalau butuh skill harus ada kesadaran dari diri sendiri gitu, ya terutama itu. Kedua dari orang tua yang mungkin masih malu, ini loh ada contoh disabilitas yang bisa berhasil karena dia sekolah atau mungkin dia kerja
A.	Kalau misalnya mungkin ketika menjalankan kegiatan-kegiatan dari program-program yang sudah ada, kendala yang paling sering dialami itu biasanya gimana aja pak?

B.	Ya kendala yang paling sering itu adalah motivasi. Teman-teman itu kadang-kadang mereka enggan gitu loh. Misalnya anaknya itu dia bersedia kadang-kadang orang tuanya juga sulit. Terus yang kedua adalah akses, misalnya akses mobilitas misalnya mungkin karena jauh ya dia pakai kursi roda, kalau kita misalnya mengundang mungkin bisa kesulitan buat datang, biasanya kalau ada seperti itu kita minta bantuan teman yang dia punya kendaraan atau apa untuk saling bantu, ini kan ada temen yang dia misalnya kejar paket ya, kita kebetulan kejar paketnya di PKBM Rumpun Aksara, misalnya dia kesulitan, kita minta bantuan dia untuk nganter waktu ujian kejar paket, itu ada beberapa teman yang seperti itu
A.	Perpenca setelah menjalankan program itu apa ada kayak sesi evaluasi?
B.	kita juga ada evaluasi, sejauh mana ini bisa diikuti oleh teman-teman, misalnya dengan pelatihan yang sudah diberikan itu apakah pelatihan ini sesuai enggak dengan teman-teman, Oh ternyata tidak sesuai ya dimana kita minta kepada pemerintah misalnya latihan yang diberikan itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan, misalnya dibutuhkan pasar saat ini, misalnya sekarang ini dibutuhkan dari penjahit sepatu misalnya, maka pelatihan yang diberikan pemerintah kita minta ya sesuai gitu. Kalau misalnya sekarang digital marketing mungkin karena teman-teman yang punya produk untuk memasarkan produknya pakai digital marketing.
A.	Kalau misal dari sisi rehabilitasi sosial, rata-rata nih pak penerimaan masyarakat terhadap disabilitas itu gimana?
B.	Ya sekarang baik ya, kalau temen-temen yang saya lihat itu mereka aktif di masyarakat, ya itu karena mungkin karena kita tetep memberi motivasi, sosialisasi, contohnya di pemilu kemarin ya hampir teman-teman itu terlibat. contohnya saya terlibat di TPS, juga ada teman-teman dia juga terlibat sebagai KPPS, terus ada yang terlibat di pengawas
A.	Terus kalau ini mungkin baru-baru ini apa masih ada keluhan-keluhan diskriminasi dari disabilitas?

B.	<p>Kalau hari ini hampir tidak ya, kalau beberapa beberapa tahun yang lalu itu ada, misalnya itu waktu jamannya Bupati Jalal itu ada beberapa teman yang dia ditolak untuk masuk sekolah, terus ada beberapa teman yang dia ikut tes CPNS ditolak, tapi waktu itu waktu jaman Bupati Jalal itu, kita minta audiensi dengan DPRD. Kemudian kita juga Audiensi dengan Bupati waktu itu dan hasilnya Bupati menjamin bahwa sejak saat itu tidak ada penolakan untuk sekolah, dan itu terbukti sejak saat itu tidak ada sekolah reguler yang menolak untuk Disabilitas sekolah, itu yang terjadi. Dan pada saat itu juga ada teman Disabilitas yang kuliah di IKIP Jember atau Unipar itu mendaftar dia ditolak, dan saat itu rektoratnya Pak Arifin, waktu itu kita minta bantuan Komnas HAM ya pokoknya dengan hal itu, dan Alhamdulillah sejak saat itu tidak ada penolakan lagi bahkan sekarang ini hampir ada mungkin ratusan teman-teman yang kuliah di Unipar ya, itu juga hasil advokasi kita gitu. Sampai hari ini kita belum mendengar ya dan kita juga sering ngomong di RRI bagaimana untuk temen-temen yang mungkin mengalami kasus seperti itu untuk kita bantu mengadvokasinya.</p>
A.	<p>Itu kan di bidang pendidikan. Nah kalau di bidang pekerjaan sendiri gimana?</p>
B.	<p>Kalau pekerjaan itu kan sudah ada kuotanya ya, kalau dalam pemerintah itu 2% kalau dalam di swasta itu 1% hari ini belum, bahkan di beberapa perusahaan hari ini sudah bisa menerima seperti ada teman di Indomaret, juga ada beberapa teman di Alfamart</p>
A.	<p>Kalau kebijakan dari pemerintah kan mungkin memang sudah ada gitu kan, kayaknya sudah baik gitu untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Jember tapi kenyataannya itu kalau menurutnya panjenengan antara kebijakan dengan yang ada di lapangan, apakah sesuai?</p>
B.	<p>Belum ya, contohnya misalnya terkait dengan 1% itu, hari ini kalau kita ngomong ya misalnya dibandingkan dengan jumlah pegawai Jember yang ribuan dengan jumlah disabilitas yang ada di situ ya jauh, mungkin hanya misalnya Jember itu ada 4000 lebih mungkin disabilitas yang sekarang di</p>

	instansi pemerintah mungkin tidak sampai 10 orang. Masih jauh sekali, kemudian terkait dengan swasta itu ya jauh banget, tapi sudah ada bukti perusahaan dan pemerintah yang penting. Kita juga sering advokasi bagaimana itu bisa terpenuhi, misalnya itu setiap tahun bisa menerima, kita juga bagaimana teman-teman itu SDM nya juga bisa sesuai, sekarang kita bisa mengadvokasi kepada pemerintah untuk menerima 2% kalau misalnya ternyata ketika misalnya nanti dibuka ya, ternyata teman-teman yang daftar tidak ada, itu juga masalah bagi kita.
A.	Itu berarti kan pada point pentingnya itu Perpenca kayak menjadi pen jembatan gitu ya dari disabilitas dan pemerintah. Paling seringnya itu cara Perpenca mengusahakan hak-hak disabilitasnya itu biasanya melalui forum apa nggih pak?
B.	Ya kita di pemerintah itu kita dilibatkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan, itu kita terlibat di Musrenbang tingkat desa, kemudian Musrenbang Kecamatan juga kita dilibatkan, dan sampai Musrenbang tingkat kabupaten kita terlibat. Dari kegiatan itu kan usulan bisa kita sampaikan, mungkin di desa itu. Jadi hasil dari perlibatan di Musrenbang itu akhirnya mungkin ada usulan dari temen-temen. Kemudian juga tahun ini, ya itu juga hasil dari usaha kita di Musrenbang ya, itu juga terkait dengan mungkin tahun ini titik amanah dari Perda itu salah satunya adalah bagaimana ada Komisi Daerah Disabilitas, itu tahun ini dijanjikan ada katanya.
A.	Masih terkait aksesibilitas terkait mungkin alat bantu untuk keseharian gitu pak, kalau dari pemerintah sendiri itu apa ada kayak mungkin apa ya pemberian alatalat gitu pak?
B.	Ada, jadi tiap tahun ada, maksudnya kalau tahun kemarin itu ada 50 ya. Alatnya itu beragam, mulai dari Kruk, kursi roda, kemudian alat-alat kaya Tossa itu yang motor roda tiga juga ada. Kemudian ada kaki palsu itu juga ada, nanti mungkin butuh kalau ada temen-temen yang mau nerima
A.	Untuk distribusinya itu biasanya gimana pak?

B.	Dari Dinsos, gini biasanya Dinsos punya program terkait itu ya, mungkin dia minta bantuan saya dan saya share di grup, baru kemudian mereka mengajukan sesuai dengan kriteria diminta oleh pemerintah, misalnya terkait dengan pemberian Tossa itu pada teman teman yang membutuhkan, misalnya teman itu melijo atau mungkin jual sayur atau diberikan kepada mereka yang memang kriteria nya pertama dia masuk di daftar disabilitas yang tidak mampu.
A.	Terus dalam menjalankan programnya ini kan selain dengan pemerintah itu apakah Perpenca menjalin kerjasama dengan komunitas lain pak?
B.	Jadi saat ini kita lagi menjalankan program dari Sigap ya, dia adalah lembaga yang saat ini juga konsen dengan itu, itu kan juga dari itu mereka support anggaran, support juga mungkin kayak narasumber atau apa, dan itu pertama tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas politik organisasi Perpenca, nanti mungkin yang kita libatkan 30 orang itu dari pertama ada perwakilan teman-teman di kecamatan itu, terus kita juga tiap tahun kita juga ada kerjasama dengan BLK Jember, kemudian juga kita pernah itu ya kita intinya adalah kita membuka diri dengan semua lembaga, karena kalau kita ngomong disabilitas ini kita tidak bisa sendiri, untuk mengadvokasi kepada pemerintah kita juga perlu bekerja sama dengan banyak orang, banyak lembaga. Intinya kita terbuka dengan siapapun
A.	Terus yang akhir-akhir ini pemberdayaan udah dilakukan itu apa aja pak?
B.	Yang jelas kalau pelatihan itu terus ya. Kemarin itu kita mengadakan 5 pelatihan yang waktu dalam rangka hari Disabilitas Internasional. Itu kita mengadakan pelatihan cukur rambut, kemudian kemarin juga ada jahit, digital marketing, kemudian ada apa ya, terus jelas kaya kejar paket itu terus
A.	Kalau dari perlindungan sosial sendiri tentang jaminan hukum untuk disabilitas itu apa ada kendala dalam memenuhinya?
B.	Saya juga punya untuk Kabag hukum ya kita juga ada, saya beberapa bulan terakhir itu juga ditawari bagaimana untuk temen-temen yang berhadapan

	dengan hukum dan butuh lawyer atau apa, itu ternyata di pemerintah juga ada program untuk Bantuan hukum,
A.	Kalau dari segi ekonomi, rata-rata atau mungkin kepedulian keluarga terhadap penyandang disabilitas itu biasanya gimana?
B.	Kalau sekarang kesadaran tentang itu sudah ada ya, misalnya ada orang tuanya seperti itu kita kasih contoh yang baik-baik, agar keluarga itu tidak menutup untuk Disabilitas itu muncul, ya seperti yang saya ceritakan tadi. Itu kita bisa memberikan motivasi kepada keluarga. ‘Kalau memang kasihan nih ini contohnya kalau jenengan kan tidak mungkin bisa menemani anak ini sampai tua, pasti nanti jenengan meninggal, apa ketika jenengan tinggal anak ini dalam kondisi dia belum mandiri ya bagaimana? Apakah ada jaminan keluarga bisa menerima itu?’ Itu bisa mengirimkan motivasi orang tua untuk mengizinkan, karena kalau namanya jenengan kasihan, jenengan harus support kan bisa terkait dengan pendidikannya, mungkin terkait dengan keterampilannya, banyak sudah program pemerintah. Tapi kadang kan orang tua enggan untuk mengizinkan
A.	Terus kalau dari internalnya perencana sendiri apakah ada rencana jangka panjang terkait kesejahteraan sosial?
B.	Yang jelas gini ya, kalau kita itu dulu kita juga sama-sama yang merintis kita punya perda ya, jadi perda itu kita usulkan mulai 2003. Karena kita sadar tanpa ada perda ini perlindungannya dapat berubah tiap ganti bupati, tapi dengan adanya perda itu kan sudah Bupatiya siapapun kan bisa advokasi. Kedua kita pendidikan, pendidikan ini sangat penting, bagaimana dia bisa mendapat pekerjaan yang layak juga dengan pendidikan. Karena teman-teman disabilitas yang dia secara ekonominya itu lemah, biasanya karena pendidikan juga lemah, akhirnya dia juga tidak bisa mengasah pekerjaan. Tapi dengan teman-teman disabilitas yang secara pendidikan dia kuat, biasanya ekonomi juga kuat. Terus terkait dengan perlindungan sosial ya, terkait BPJS teman-teman disabilitas juga ada prioritas untuk mendapatkan BPJS itu.

Transkrip Wawancara Bersama Pendiri Perpenca

A.	Apa yang melatar belakangi berdirinya Perpenca?
B.	<p>Jadi, yang pertama Perpenca ini latar belakang berdirinya karena waktu itu, tahun 2009 waktu itu ya. Eh, sorry, 9 Juli 2003. Waktu itu latar belakangnya pertama, kebijakan adanya penghapusan dinas sosial. Sehingga karena dinas sosial ini yang membidangi bidang disabilitas, para penyandang disabilitas ini bingung. Kalau begitu disabilitas harus ikut dinas apa? Itu latar belakang secara formalnya, secara substansinya latar belakang berdirinya ini adanya permasalahan yang selalu ada pada disabilitas, khususnya penyandang disabilitas yang usia produktif. Usia produktif mereka akan kerja apa? Bagaimana masa depan mereka dan sebagainya. Dari dua hal ini, maka lima orang ini bersatu untuk membentuk organisasi waktu itu. Kan namanya waktu itu Perpenca itu kepanjanganannya Persatuan Penyandang Cacat. Karena dasar hukum kita waktu itu Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Sekarang karena adanya Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka kepanjangan Perpencan kita ganti, tidak lagi Persatuan Penyandang Cacat, tapi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi</p>
A.	Dulu awal-awal Perpencan berdiri itu gimana sih Pak, caranya untuk menjangkau penyandang disabilitas di masing-masing daerah?
B.	<p>Jadi strategi kita waktu itu kita melakukan touring secara fisik ya. Touring secara fisik untuk memungkinkan setidaknya waktu itu setiap kecamatan itu kita punya satu anggota. Satu anggota difabel yang kita rekrut untuk bergabung. Harapannya satu anggota itu nanti bisa ketok tular pada teman-temannya yang ada di kecamatan itu. Setelah mereka punya komunitas masing-masing, maka secara struktural Perpenca kita bentuk</p>

	yang namanya perwakilan kecamatan dan ada lagi di bawahnya yaitu perwakilan desa
A.	menurut Panjenengan kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember sendiri sekarang itu gimana Bapak?
B.	Maksudnya kondisi apanya ini?
A.	Kondisi seperti penerimaan penyandang disabilitas di masyarakat, kalo melihat kondisi yang sekarang gimana menurut panjenengan?
B.	<p>Sebenarnya kalau ngomong penerimaan, masyarakat itu juga masih rentan dengan stigma. Sampai sekarang masih tetap. Bahkan maaf juga, bagi pemerintah, isu difabel ini juga dipandang kurang seksi. Buktinya apa? Contoh saja. Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Jember saat itu juga punya namanya perda. Perda nomor 7 tahun 2016 tentang disabilitas juga. Sampai dengan sekarang implementasi perda itu hampir masih minim sekali. Ini kan sebenarnya juga bagian dari stigma itu. Stigma yang dilakukan oleh masyarakat ataupun stigma yang tanpa sengaja dilakukan oleh mereka.</p> <p>Jadi kalau hanya bedanya, apa bedanya perlakuan masyarakat pada difabel saat ini dengan yang dulu-dulu? Kalau dulu itu diskriminasi dilakukan terang-terangan dan nyata. Seperti sekolah menolak difabel dulu tidak ada susah-susahanya. Tapi kalau sekarang tidak berani mereka melakukan itu. Menerima itu. Meskipun secara dukungan sistem, dukungan kebijakan dan sebagainya, untuk gaimana caranya difabel bisa sekolah, itu masih kurang optimal juga.</p> <p>Contoh yang kedua terkait tenaga kerja: Kalau dulu tenaga kerja, tidak ada yang namanya kuota 2% untuk difabel. Ditolak-tolak saja. Sekarang sistem mulai diterima dengan adanya kuota. Tapi pun adanya kuota itu tidak menjamin adanya rekrutmen. Sehingga sebenarnya kalau dampak diskriminasinya masih nyata. Hanya cara mereka memperlakukan itu tidak sekasar dulu.</p>

B.	Kalau untuk terkait aksesibilitas, Pak, terkait aksesibilitas untuk lingkungan fisik dan non-fisiknya itu gimana, Pak?
	<p>Yang jelas ada perkembangan. Kalau saya ngomong, tidak. Saya mengingkari realita. Tetap ada perkembangan, tapi perkembangannya itu tidak signifikan. Contoh simpel. Kita ngomong konteks Jember. Pembangunan alun-alun Jember. Kalau ditanya akses atau tidak? Kalau saya mengatakan sebagian akses, sebagian tidak. Karena memang di depan sendiri ada ramp untuk naik ke alun-alun. Tapi kamar mandi untuk disabilitas tidak disediakan. Artinya penyediaan aksesibilitas itu masih juga belum optimal.</p> <p>Terus yang kedua terkait dengan non-fisik. Non-fisik ini kan bisa berupa kebijakan dan sebagainya. Itu pun juga belum tercover dengan baik. Contoh simple adanya biasiswa Pemkab. Kemarin tidak ada alokasi khusus biasiswa Pemkab untuk penyandang disabilitas.</p>
A.	Lalu terkait layanan rehabilitas sosial sendiri, biasanya para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember ini bisa mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dari mana nggih pak?
B.	Ya, kalau di Jember umumnya dari dinsos. Cuma tiga tahun terakhir ini, dinsos tidak pernah mempunyai program-program yang semacam itu. Bahkan pelatihan kerja dan sebagainya juga tidak ada.
A.	Berarti kalau misalnya ada pelatihan kerja itu biasanya dari siapa?
B.	Kita kalau di Perpenca itu memang selama ini kan mengikuti program pemerintah. Pun kalau tidak ada biasanya dari kita untuk kita. Dari teman-teman disabilitas sendiri untuk melatih teman-teman disabilitas sendiri.
A.	Selanjutnya terkait jaminan sosial. Kalau mungkin kita lihat dari sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Jember sendiri, untuk pemenuhan sandang pangan dan papannya ini menurut panjenengan gimana?
B.	Jadi secara umum, data secara umum kan secara WHO ya. WHO menyatakan dalam datanya satu dari sepuluh orang miskin di Indonesia

	<p>itu adalah difabel. Bahkan hampir semua di setiap satu KK dari orang miskin di Indonesia pasti ada difabelnya. Artinya apa? Memang difabel dengan kemiskinan itu masih sesuatu yang sangat berkaitan. memang karena kemiskinan, kurangnya pemahaman ilmu, kurang gizi dan sebagainya, lahirlah anak keturunan difabel. Dari difabel dia didiskriminasi, dia tidak bisa sekolah, dia tidak dapat kerja, miskin lagi, teruss seperti itu. Jadinya seperti lingkaran setan, siklus setan.</p>
A.	<p>Untuk berikutnya terkait jaminan kesehatan, untuk layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas sendiri itu bagaimana pak?</p>
B.	<p>kalau dilihat dari lima tahun terakhir itu ada peningkatan menurut saya, karena sejak adanya BPJS untuk mengcover kesehatannya teman-teman difabel secara gratis, itu alhamdulillah. Hanya program BPJS sendiri itu kan tidak mengcover jaminan-jaminan kesehatan yang spesifik, seperti kesehatan atau penyakit yang itu dampak dari kondisi difabelnya, itu belum terpikirkan oleh pemerintah.</p>
A.	<p>Nah itu untuk kesehatan, kalau pendidikan gimana pak? Kalau dulu ada aksi nyata nih, diskriminasinya secara terang-terangan di dunia pendidikan. Kalau sekarang untuk difabel di dunia pendidikan gimana?</p>
B.	<p>Sekarang kan lagi galak-galaknya pemerintah gaungkan program inklusi. Hanya pada tataran praktisnya, pendidikan inklusi ini kan tidak berjalan sebagaimana idealisme yang ada. Programnya ada, tapi dukungan untuk program ini berjalan dengan maksimal ini kurang. Apa contohnya? kewajiban menerima difabel di semua sekolah Itu tidak diiringi dengan rekrutmen guru-guru difabel, tidak diiringi dengan penyediaan sarana pasarana untuk difabel dan sebagainya. Kemarin Perpenca itu mengadakan riset, saya yang memimpinya, itu kami mengambil sampel 10 desa, 5 desa di kota, 5 kelurahan di desa. Hasilnya rata-rata dari 10 itu hampir setiap desa di Kabupaten Jember itu rata-rata ada sekitar 10 orang difabel usia sekolah tapi tidak bersekolah. Ada 10, Jember itu kalau tidak</p>

	salah punya 264 desa. Kalau dikalikan 10 berarti ada 2600 difabel usia sekolah yang tidak bersekolah. Itu contoh nyata di dunia pendidikan.
	Nah untuk kesempatan kerja itu kan tadi bapak juga menyebutkan, sudah ada undang-undang yang 1% untuk difabel di dunia kerja. Namun kenyataannya itu gimana bapak?
B.	Ya kenyataannya, saya selama menjadi aktivis di Jember tidak pernah ada suatu perusahaan itu secara terang-terangan menerima lowongan pekerjaan, khususnya di instansi pemerintahan. Kalau swasta saya hanya mendapatkan untuk di dua perusahaan. Indomaret sama perusahaan tembakau di Arjasa. Itu saja di Kabupaten Jember yang saya tahu
A.	Nah, ini mungkin jawabannya kayak yang tadi. Tapi saya mau coba lagi tentang pemberdayaan. Hambatan utama penyandang disabilitas untuk memiliki usaha atau paling enggak memiliki kerja, mendapatkan pekerjaan itu apa bapak?
B.	Pendidikan. Dengan SDM yang rendah, apa yang mau dia lakukan, yang kedua adalah kepercayaan masyarakat dalam melihat disabilitas. Sama-sama jualan makanan, satunya penjualnya difabel, satunya enggak difabel. Orang pasti pilih makanannya dijual oleh orang yang enggak difabel. Itu realita. Stigma itu yang menjadi kendala. Yang kedua itu faktor eksternal ya. Faktor internal tadi SDM. Faktor eksternal ini adalah dukungan dari pemerintah. Pemerintah jarang memfasilitasi disabilitas ini untuk berwirausaha. Minimal bupati yang meng-endorse produk-produknya difabel misalnya. Atau mungkin difabel kan ada yang pinter menjahit, Oh seragamnya Pemda yang jahit difabel. Cateringannya Pemda yang masak teman-teman difabel. Ini kan nyatanya tidak dilakukan. itu kurangnya support itu yang menjadi salah satu hambatan
A.	Nah, untuk ini Bapak, kan Perpenca juga sering mengadakan pelatihan untuk difabel. Itu biasanya dalam satu tahun berapa kali, Bapak? Atau tidak terencana atau gimana?

B.	Kita itu memang tidak punya program. Karena program itu kan butuh pendanaan. Yang biasanya kita lakukan itu awalnya ya need assessment dulu. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman sekarang? Misalnya, oh sekarang lagi trendnya e-commerce. Oh, ayo kita coba mengajukan pelatihan e-commerce. Langkah pertama yang kita lakukan sebelum kita melakukan secara mandiri, kita coba untuk bermitra.
A.	Terus lanjut ke perlindungan sosial. Kalau untuk masyarakat umum sendiri, itu tingkat kesadaran masyarakat umum terhadap hak disabilitas itu gimana, Bapak?
B.	Saya memang tidak pernah melakukan penelitian secara eksplisit terkait ini. Tapi dari indikator-indikator yang saya lihat, contoh misalnya tempat parkir-tempat parkir yang sudah dibuat oleh Pemkab untuk difabel, itu banyak yang ditempati orang-orang yang non difabel. Artinya mereka kan belum punya awareness terhadap disabilitas. Itu indikator yang saya lihat. Kemudian ketika ada disabilitas, misalnya contoh ada tunanetra menyebrang jalan, para pengguna jalan yang lain takkan ada yang peduli. Jadi memang PR kita dalam memberikan edukasi kepada masyarakat itu
A.	Nah, terkait advokasi seperti layanan hukum itu, mungkin apakah ada hambatan dari penyandang disabilitas dalam mengakses layanan hukum, atau perlindungan sosial gitu?
B.	Kalau hukum insya Allah dari sisi penegak hukum sendiri sudah cukup baik menurut saya. Sebenarnya, beberapa kasus disabilitas di hadapan hukum, ini cara mereka memperlakukan disabilitas juga menurut saya cukup baik. Baik disabilitas sebagai korban maupun disabilitas sebagai pelaku. Ini sudah cukup bagus lah
A.	Jadi Perpenca ini kan komunitas nih Pak. Dan kalau misalnya mau mengadakan program seperti pelatihan itu kan need assessment dulu. Tapi sebelumnya ini ada kayak semacam rapat perencanaan gitu?
B.	Jadi gini, di Perpenca itu ada dua macam rapat. Ada rapat tiga bulanan sama rapat tahunan. Biasanya di rapat-rapat itulah kita nanti

	<p>mendiskusikan permasalahan-permasalahan itu. Jadi itu kita angkat sebagai need assessment-nya. Apa sih permasalahan yang ada, solusinya apa, dan bagaimana teknis melakukan solusi itu. Contoh sederhana, karena kita sadar bahwa masalah terbesar difabel saat itu ya adalah SDM. Maka kita buat program yang pertama, pengentasan difabel yang tidak lulus SMP dan SMA, lalu program kejar paket ABC. Setelah itu kita lanjut program untuk mereka kuliah mendapatkan beasiswa di kampus ini. Itu juga bagian dari strategi.</p>
A.	<p>Kalau dari kesejahteraan sosial yang belum terpenuhi karena mungkin regulasi yang belum jalan secara optimal itu dari perpenca sendiri apakah ada strategi Bapak?</p>
B.	<p>Kita sering melakukan hearing ya. Hearing dengan DPR, hearing dengan Bupati. Ini tentunya yang selama ini kita lakukan. Tapi kan kembali kepada kebijakan dari si pengambil keputusan ini lah ya. Jadi itu tidak ada upaya lain selain hearing karena dengan hearing kan kita mengkomunikasikan permasalahan dan sebagainya</p>
A.	<p>Lalu kalau untuk menarik semangat ataupun motivasi dari para penyandang disabilitas dalam mengikuti program yang dimiliki oleh Perpenca sendiri bagaimana bapak?</p>
B.	<p>Biasanya langkah yang kita lakukan adalah pendekatan persuasif, komunikatif, dengan kita mungkin memberikan komunikasi kepada perwakilan desa maupun kecamatan untuk melakukan pendekatan-pendekatan, penyampaian dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Memang ada faktor-faktor seperti keluarga. Keluarga bisa saja menjadi penghalang. Contoh, ada difabel yang ingin kuliah, kadang-kadang keluarga tidak setuju. Kita lakukan silaturahmi, kita komunikasi dan sebagainya. Dan bisa jalan dan sebagainya, segala macam. Itu yang kita lakukan</p>
A.	<p>Untuk program yang baru-baru ini dilaksanakan Perpenca ini apa bapak?</p>

B.	Kalau kita di akhir-akhir ini memang lebih fokus kepada program kejar paket dan kuliah. Dan program pelatihan komputer. Kita ke situ ya. Karena memang orientasinya agar mereka ya melek teknologi di era teknologi. Dan itu sampai sekarang masih berjalan prosesnya
A.	Oke, Itu tadi berarti programnya berdasarkan need assesment. Dari Perpenca sendiri mungkin sampai sekarang ini apakah ada evaluasi terhadap keberhasilan program-program yang dilaksanakan?
B.	Biasanya baru kita lakukan evaluasi itu kalau ada kendala yang sangat berarti. Yang itu benar-benar dapat menghambat program yang berjalan.
A.	Kalau untuk rencana jangka panjang dari Perpenca sendiri untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Jember gimana Bapak?
B.	Jadi memang kan kemarin melalui... Ini Perpenca ini kan sekarang juga berkembang tidak hanya LSM standar. Tapi kita juga sekarang punya yayasan. Yayasan Jember Advokasi Disabilitas. Yang ini yang harapan kita nanti yayasan ini juga nanti bisa mendirikan cikal bakal sekolah-sekolah. Yang harapannya nanti kita bisa menampung anak-anak disabilitas supaya bisa sekolah. Jadi dengan memanfaatkan teman-teman difabel itu sebagai gurunya. Sehingga dari difabel untuk difabel ini gambaran jangka panjang kita.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Transkrip Wawancara Bersama Bapak Ahmad Yasin

A.	Bagaimana menurut anda kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
B.	Ya karena disabilitas ya. Disabilitas itu adalah orang yang dengan hambatan. Jadi kalau sudah menyandang hambatan, ya otomatis untuk beraktivitas itu juga mengalami hambatan, otomatis juga kesejahteraannya di bawah rata-rata. Baik di pekerjaan atau di sosial masyarakat, perlakuan yang tidak sama lah dari orang lain kan. Ya dalam rangka itu kan kita membentuk komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan lain-lain.

A.	Bagaimana penerimaan masyarakat saat ini terhadap difabel menurut anda?
B.	Ya ada peningkatan sedikit-sedikit lah, kalau difabel dilihat secara fisik kan ya dapet pandangan dari yang lain 'apa dia bisa' kan gitu, makanya kita itu kadang dipermudah dalam mengurus sesuatu itu kalau ada backingan orang, orang dalam lah istilahnya.
A.	Kebijakan untuk penyandang disabilitas ini kan sudah cukup banyak, namun kalau menurut anda, bagaimana kenyataan yang ada di lapangan?
B.	Ya kan ada kebijakan penerimaan kerja untuk disabilitas 1% dan 2 %, kemarin juga ada pembukaan P3K itu tapi temen saya nggak ada yang lolos.
A.	Oke, nah itu tadi kan di dunia kerja, kalau penerimaan masyarakat di lingkungan sosial tempat tinggal itu biasanya gimana pak, penerimaan terhadap difabel dalam kegiatan sosial bermasyarakat?
B.	Ya kalau penilaian saya, pengalaman saya juga ya, masyarakat itu ya biasa saja, masyarakat itu tidak membedakan sebenarnya. Tapi kita yang merasa ada hambatan, misalnya ketika saya ada undangan, ketika saya melewati jalan untuk masuk ke tempat itu terus terjatuh, siapa yang mau tolong, kan gitu perasaannya. Mungkin bagi yang normal, biasa aja nggak ada hambatan, sehingga tidak mengerti beretika dengan orang disabilitas itu seperti apa, apa perlu dibantu atau gimana kan gak tau. Akhirnya saya sendiri jarang datang kalau diundang di suatu acara, kecuali saudara. Saudara pun juga kadang ya perlakuannya nggak sama dengan yang lain.
A.	oh iya, kalau panjenengan sendiri sekarang kesibukannya apa pak?
B.	saya sebagai seorang teknisi elektro. Saya kadang ngajak istri kalau kerja. Ya alhamdulillah saya itu masih ada skill lah, jadi kalau dibanding dengan teman-teman saya yang lain itu, sudah sekolahnya nggak lulus, dukungan orang tua nggak ada, kadang ekonomi juga lemah, akhirnya kan ya kadang minta-minta gitu, mengharap bantuan dari pemerintah
A.	oh iya bapak, dari pemerintah itu apakah ada layanan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas?
B.	nggak ada, mungkin anggarannya belum ada

A.	selama anda sekolah di sekolah umum dulu, apakah pernah mendapatkan deskriminasi?
B.	ya ada dulu masih SD, ya kayak digunjing gitu. Tapi ya untungnya saya itu anggap biasa hal kayak gitu, nggak minder.
A.	lalu terkait jaminan sosial, apakah penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan itu mendapatkan kemudahan?
B.	ya itu sebenarnya hambatannya kan harus melalui desa dulu kan. Tapi desa itu kadang tidak memasukkan disabilitas ke data itu karena mungkin melihat rumahnya yang keramik atau apa gitu kan, jadi ada sebagian disabilitas itu tidak masuk di DTKS
A.	menurut panjenengan, apakah penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan itu sudah mudah?
B.	pengalaman saya itu waktu KKN di desa ini kebetulan, saya mendata usia anak sekolah untuk disabilitas, nah ternyata ada orang tua yang mengharapkan adanya SLB di Arjasa. Juga yang sudah sekolah di umum itu kecewa, karena anaknya tidak ada perkembangan, karena di sekolah tersebut tidak menyediakan guru pendamping khusus. Itu yang saya alami, makanya temen-temen itu tahun ini rencananya ingin mendirikan SLB di Arjasa
A.	kalau untuk bantuan sosial, untuk disabilitas ini apakah ada sendiri dan apakah sudah tersalurkan dengan baik nggih pak?
B.	nah ini pengalaman saya juga kemarin, terkait yang sudah saya data tentang disabilitas, saya kan mau ngecek di desa itu punya nggak datanya gitu, saya tanya ke sekdes arjasa, terus sekdesnya mengeluarkan data disabilitas yang mendapatkan bantuan beras, itu ada 15 orang, terus saya cek nama-namanya, ternyata bukan disabilitas, jadi yang dapat beras itu bukan disabilitas juga bukan data disabilitas itu. Itu orang biasa tapi mungkin ngakunya ke sekdes kalau dia orang disabilitas. lalu terkait alat bantu, seperti tongkat ataupun alat bantu yang lain, itu apakah dari pemerintah ada bantuannya pak?

B.	dari pemerintah itu kita harus minta, padahal pemerintah itu sudah tau tentang disabilitas itu, harusnya kan dipetakan, yang tuli butuh apa, yang netra butuh apa, yang daksa butuh apa. Baru kalau kita ngajukan, itupun prosedurnya masih bulet lah, malah yang swasta yang malah banyak ngasih itu, dari Yayasan rengganis itu. Lucu kalau dari pemerintah itu, seakan-akan dari pihak dingsos itu yang diurus hanya lansia, orang gila, anak telantar, sedangkan yang disabilitas nggak begitu dipikirkan. Padahal kalau disabilitas, kayak alat bantu dengar itu kan batrainya cepat habis
A.	kalau pelatihan-pelatihan, apakah anda sering ikut?
B.	ada pernah ikut saya, dari dinas koperasi yang sering mengadakan. Dinas koperasi yang Kerjasama dengan BLK. Sementara kalau dingsos itu pernah dulu sekali dapet pelatihan dan alat, tapi nggak ada pendampingan selanjutnya
A.	menurut panjenengan Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas itu gimana pak?
B.	ya sebenarnya masyarakat itu tidak menyadari sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh disabilitas. Dan disabilitas juga kadang tidak mau menuntut, diem aja gitu. Ya termasuk perangkat desa ya nggak tau juga gitu. Jadi serba gimana gitu kan. Makanya sekarang mau didirikan komisi daerah disabilitas kan, sebagai perangkat yang menjelaskan terkait disabilitas
A.	Oh iya, bapak bergabung dengan Perpenca ini sudah berapa lama?
B.	sudah dari 2004, waktu saya sudah menikah baru ketemu dengan teman-teman. Sebelumnya saya merasa sendiri
A.	menurut panjenengan, di Kabupaten Jember terkait aksesibilitas untuk lingkungan fisik bagi disabilitas itu apakah sudah ramah disabilitas atau belum?
B.	ya kan kadang Cuma tempat parkir aja yang ramah, kadang itu pun ditempati orang lain gitu, nggak kebagian kadang yang disabilitas roda tiga gitu, ya masih kurang lah masih. Saya kan sering ke kantor pajak, sering ke bank, itu saya sudah ngasih kritik dan saran di kantor pajak sana, kan tangganya tinggi

	itu, nggak ada pegangannya, untung saya nggak jatuh di sana. Tapi itu nggak ada tanggapan itu
A.	apa yang anda rasakan selama bergabung dengan Perpenca?
B.	ya alhamdulillah dengan adanya Perpenca kita dapat advokasi, teman-teman, ya dapat BPJS, terus bisa dapet info pekerjaan di tempat-tempat swasta seperti alfamart, ya itu
A.	menurut panjenengan, program yang dimiliki Perpenca sebagai strategi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember apakah sudah efektif?
B.	ya berapa persen ya efektifnya, sudah alhamdulillah lah ya, bisa dpaat ijazah dengan adanya Kerjasama dengan rumpun aksara itu bisa mendapatkan ijazah dan melanjutkan kuliah di tempatnya Pak Mais itu. Tapi ya gitu, karakter itu kan nggak mudah untuk langsung berubah, masih butuh proses itu, menuntut ilmu itu memang wajib, dan butuh kesadaran

Transkrip Wawancara Bersama Bapak Ari

A.	menurut anda bagaimana kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember saat ini?
B.	kalau dari pemerintah sendiri sudah sedikit lebih baik, kalau dulu kan mau mengakses informasi atau bantuan-bantuan yang sifatnya untuk mengembangkan diri dari pemerintah itu susah kan ya, nah kalau sekarang itu agak mendingan karena dari perjuangannya teman-teman Perpenca itu sendiri. Kalau dari masyarakat ya mungkin ada sih satu dua yang masing nganggap kita disabilitas itu orang yang dalam tanda kutip 'tidak mampu'. Padahal kan sebenarnya kita itu bisa tapi dengan cara yang berbeda. Stigma negative itu yang masih ada.
A.	apakah selama ini panjenengan pernah mendapatkan diskriminasi dari orang-orang?

B.	kalau saya pribadi sih sepertinya belum pernah ngerasain itu ya, karena mungkin dari sisi saya sendiri membuka diri untuk bergaul dengan mereka. Biasanya itu kan karena dari kitanya yang kurang berkomunikasi dengan pihak luar atau masyarakat sekitar itu akhirnya negative thinking sendiri. Padahal dari kita dulu yang harus membuka diri, baru mereka tau apa keinginan kita gitu.
A.	Terus terkait rehabilitasi sosial, apakah panjenengan pernah mengikuti layanan rehabilitasi sebelumnya?
B.	saya pernah dapet rehabilitasi kaya terapi itu dulu waktu masih di SLB, waktu kecil itu. Kalau dari setelah keluar SD sampai sekarang tuh nggak pernah sih. Alhamdulillah karena mungkin bisa dikatakan ya disabilitasnya itu masih ringan.
A.	menurut panjenengan bagaimana peran keluarga untuk mendukung penyandang disabilitas mengembangkan potensinya?
B.	ya terutama untuk peran keluarga itu hal pertama harus menerima kenyataan bahwa si anaknya itu disabilitas ya. Kadang-kadang kan ada keluarga yang tidak menerima, malahan ada yang disimpenn gitu loh, diisolasi gitu ya. Jadi yang pertama itu harus menerima dulu, baru setelah itu mengupayakan pendidikan dari sisi anak ini. Ya tentunya peran pemerintah di sini juga harus jemput bola ya untuk mencari orang-orang disabilitas ini gitu, kan yang memiliki power untuk melakukan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan itu kan dari pemerintah juga.
A.	ngomong-ngomong tentang kebijakan, menurut anda apakah kebijakan dari pemerintah tentang penyandang disabilitas sudah sesuai dengan yang ada di lapangan?
B.	dari sisi jumlah sekolah saja bisa dikatakan masih kurang, harusnya kan satu kecamatan itu satu SLB. Nah saya kan kebetulan kuliah di Unipar, nah KKN nya tuh mendata teman-teman disabilitas di Arjasa ya untuk nantinya kedepannya diadakan perintisan sekolah SLB gitu, nah itu banyak ditemui meeka tuh kesulitan transportasi, kan jarak dari rumah ke

	sekolah jauh banget ya, terus kebanyakan disabilitas itu berasal dari keluarga kurang mampu, itu juga yang menjadi kendala mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan.
A.	terkait kendala yang ada, seperti kesulitan mobilitas dan transportasi itu apakah sudah ada Solusi?
B.	kalau dari pemerintah kayanya belum ada mbak, harusnya kan misalnya menyediakan apa transportasi disabilitas misalnya kan ya, sampai sekarang itu kayanya nggak ada, itu dia yang menjadi kendala juga. Jadi ya harus ada kemauan kuat dari pihak keluarga dan juga dari si penyandang disabilitasnya itu sendiri untuk mendobrak batasan diri untuk bisa sekolah gitu. Contohnya kaya saya sendiri dulu kan sulit untuk sekolah, saya sampai dijemput gutu untuk ke SLB itu
A.	menurut panjenengan dalam mengakses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas itu mudah atau tidak?
B.	biasanya kalau kebijakan kesehatan itu tergantung bupati biasanya mbak, kalau dulu tuh waktu Bu Faida masih jadi bupati itu kita, ya mungkin karena RS Bina Sehat itu masih milik pribadi ya jadi teman-teman disabilitas itu gampang sekali untuk berobat atau mengurus administrasi tentang kesehatan itu mudah. Ya mungkin sampai sekarang pun masih tetap. Tapi dari bupati sekarang yang menjabat ini sepertinya belum ada sesuatu yang bisa ditawarkan untuk kita penyandang disabilitas.
A.	kalau terkait layanan BPJS itu gimana bapak? Apakah sulit untuk penyandang disabilitas mengaksesnya?
B.	kalau mengurusnya mungkin ya biasa ya kayak administrasi gitu ya, yang jadi kendala itu kan biasanya BPJS itu kan bayar ya mbak biasanya. Nah itu Kembali ke kemampuan ekonominya teman-teman disabilitas sendiri.
A.	lalu ada nggak sih bantuan sosial untuk penyandang disabilitas dari pemerintah?
B.	bantuan kaya alat bantu pasti tetep pada dari dinas sosial. Itu kan sepertinya tiap tahun tuh ada alokasi khusus untuk teman-teman

	<p>disabilitas, nah itu yang ngedata biasanya Pak Zen lewat grub itu, biasanya ngelist siapa yang butuh alat bantu. Kalau akses pendidikan sih temen-temen lebih butuh beasiswa untuk sekolah, kuliah gitu. Tapi kan biasanya kalau Ganti bupati juga Ganti kebijakan, akhirnya kan continueuistas dari beasiswa itu sendiri nggak diteruskan.</p>
A.	<p>kalau terkait kesempatan kerja penyandang disabilitas, hambatan apa yang paling sering dihadapi oleh para difabel ini?</p>
B.	<p>biasa SDM dari temen-temen disabilitas ini yang nggak bisa memenuhi kuota dari lowongan kerja. Dulu itu pernah ada lowongan kerja, minimal kan kebanyakan S1 ya, sedangkan temen-temen ini ada yang nggak lulus SMP, ada yang nggak lulus SD, ada yang nggak pernah sekolah sama sekali. Jadi dari Perpenca sendiri mengupayakan temen-temen ini bisa pendidikan dulu yang diperbaiki. Sekarang itu kan ada Kerjasama dengan rumpun aksara itu yang kejar paket di Panti itu ya. Itu temen-temen banyak yang belum sekolah atau terputus itu banyak yang ke sana. Nah setelah lulus dari sana, itu kebetulan ada Pak Mais ini yang juga pejuang disabilitas dan Perpenca juga, beliau itu wakil rektor di Unipar itu. Beliau yang mengupayakan agar temen-temen bisa kuliah di Unipar sana. Jadi istilahnya membangun SDM dulu, baru bisa memenuhi kualifikasi kerja itu. Tapi kebanyakan temen-temen itu usaha sendiri sih.</p>
A.	<p>Oh kebanyakan usaha sendir. Tapi kalau usaha sendiri itu biasanya dapat dukungan tertentu dari pemerintah atau tidak Pak?</p>
B.	<p>kalau selama ini yang dirasakan temen-temen Perpenca itu ya bantuan pelatihan kerja itu. Tapi sepertinya ya mungkin Kembali ke mentalnya temen-temen ya, karena kebanyakan setelah dari pelatihan itu nggak dilanjutkan gitu loh, ya hanya temen-temen tertentu aja yang bisa melanjutkan.</p>
A.	<p>kalau dari panjenengan sendiri apakah juga sering mengikuti pelatihan yang ada?</p>

B.	kalau saya ya dulu itu masih usia-usia SMA tuh sering ikut, kayak pelatihan cukur rambut, terus computer. Yang lanjut sampai sekarang itu computer. Saya kan usaha jasa print-print an itu kan, sama warnet itu.
A.	Oh iya saya lupa bertanya, panjenengan gabung di Perpenca sudah berapa lama?
B.	kalau gabung Perpenca itu sih pokoknya, stigma yang berlaku sampai sekarang itu, pokoknya disabilitas itu sudah dianggap menjadi anggota.
A.	Oh gitu, terus kalau mulai aktifnya di Perpenca itu sejak kapan?
B.	kalau aktif di Perpenca itu sebenarnya kalau say aitu dari awal pendirian itu saya sudah ikut nimbrung sih, waktu itu masih SD saya sekolahnya, Cuma sudah tau sepak terjang temen-temen ini kayak Pak Zen, Pak Mais, Mas Antok gitu. Dari tahun 2000an sih kayanya mbak.
A.	bagaimana menurut panjenengan terkait aksesibilitas yang ada di Kabupaten Jember?
B.	ya sudah ada itikad baik lah dari pemerintah sini ya. Saya ambil contoh di alun-alun itu sudah ada tempat parkir khusus disabilitas gitu ya, terus kalo mau di alun-alun itu sudah ada ramp untuk kursi roda. Cuma kalo untuk mayoritas Gedung-gedung bertingkat itu masih jauh.
A.	nah kalau untuk program seperti pelatihan dari Perpenca itu sering ya pak?
B.	sering itu, hampir tiap tahun selalu ada.
A.	dan itu apakah ada Kerjasama dengan Lembaga lain?
B.	iya dinas sosial biasanya yang ngadakan pelatihan itu. Kerjasama BLK juga.
A.	menurut panjenengan seberapa efektif program-program yang dimiliki Perpenca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
B.	ya kalau bilang efektif sih ya efektif mbak, karena beberapa dari temen-temen yang sudah lulus dari kejar paket itu kayanya sekarang mau daftar ke Unipar. Jadi mereka ada kemauan untuk menaikkan level diri.

Seenggaknya walaupun setelah sekolah atau kuliah itu tidak langsung dapet kerja, tapi setidaknya bisa memperbaiki pola pikir lah ya. Mayoritas temen-temen itu sudah bekerja punya usaha sendiri kok. Kalau mau mengakses kayak di Perusahaan itu kayanya sek jauh sek. Hanya satu dua orang yang bisa masuk. Kalau mau ningkatin SDM ya itu Kembali ke keluarga, karena masih ada yang belum bisa menerima kehadiran anaknya yang disabilitas. Di desa-desa itu masih ada kayanya kalau ditelusuri itu, yang anaknya disimpen jadi dianggep aib gitu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

H. Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Sumber Data	Fokus Penelitian
Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENC A) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di	1. Strategi	1) Perencanaan strategi 2) Implementasi strategi 3) Evaluasi strategi	1) Perencanaan strategi: a. Perumusan visi dan tujuan b. Penentuan strategi 2) Implementasi strategi: a. Pelaksanaan program 3) Evaluasi strategi: a. Monitoring b. Perbaikan	Pendekatan: Kualitatif Jenis Penelitian: Studi Kasus Teknik Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi	Data Primer: 1) Ketua PERPENC A 2) Anggota PERPENC A Data Sekunder: 1) Jurnal 2) Buku 3) Skripsi 4) Internet	1. Bagaimana bentuk hambatan pemenuhan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana strategi PERPENC A dalam upaya

Kabupaten Jember	3. Kesejahteraan Sosial dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	1) Rehabilitasi sosial 2) Jaminan sosial 3) Pemberdayaan sosial 4) Perlindungan sosial	1) Rehabilitasi sosial: a. Motivasi dan diagnosis sosial b. Perawatan dan pengasuhan c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan d. Bimbingan mental spiritual	Analisis Data (Miles & Huberman): a. Pengumpulan Data b. Reduksi Data c. Penyajian Data d. Kesimpulan dan Verifikasi Keabsahan Data: a. Triangulasi sumber b. Triangulasi teknik	meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?
------------------	--	---	--	---	---

			<p>e. Bimbingan fisik</p> <p>f. Bimbingan sosial</p> <p>g. Pelayanan aksesibilitas</p> <p>2) Jaminan sosial:</p> <p>a. Asuransi kesejahteraan sosial</p> <p>b. Bantuan langsung berkelanjutan</p> <p>c. Bantuan khusus</p> <p>3) Pemberdayaan sosial:</p>		
--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none">a. Peningkatan kemauan dan kemampuanb. Penggalian potensi dan sumber dayac. Pemberian akses dan bantuan usaha <p>4) Perlindungan sosial:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bantuan sosialb. Advokasi sosialc. Bantuan hukum		
--	--	--	--	--	--

I. Informed Consent

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Zaenuri Rafiq
Alamat : Perum Dharma Alam Blok BE-07
Usia : 46 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi menjadi subjek dalam kegiatan penelitian tugas akhir (skripsi) yang berjudul "Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas Dan Center Advokasi (Perpenca) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember" dengan dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saya memberikan izin kepada sdr Manda Rosa Yanti untuk menggunakan data hasil tes wawancara untuk mendukung proses penelitian skripsi mahasiswa yang bersangkutan. Prosedur penelitian ini tidak akan memberikan dampak dan resiko apapun pada informan. Kerahasiaan jawaban atau informasi yang saya berikan dijamin sepenuhnya oleh peneliti.

Jember, 12 April2025

Informan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(Moh. Zaenuri Rafiq)

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrorul Mais, S.T., S.Pd., M.Pd.
 Alamat : Perumahan Sundana Village C 3-4 Gebang.
 Usia : 42
 Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi menjadi subjek dalam kegiatan penelitian tugas akhir (skripsi) yang berjudul "Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas Dan Center Advokasi (Perpenca) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember" dengan dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saya memberikan izin kepada sdri Manda Rosa Yanti untuk menggunakan data hasil tes wawancara untuk mendukung proses penelitian skripsi mahasiswa yang bersangkutan. Prosedur penelitian ini tidak akan memberikan dampak dan resiko apapun pada informan. Kerahasiaan jawaban atau informasi yang saya berikan dijamin sepenuhnya oleh peneliti.

Jember, 15 April.....2025

Informan

(.....Asrorul Mais.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yasin
 Alamat : II. Suprayitno, Arjasa
 Usia : 51 tahun
 Jenis Kelamin : Laki - laki

Menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi menjadi subjek dalam kegiatan penelitian tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas Dan Center Advokasi (Perpenca) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember”** dengan dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saya memberikan izin kepada sdr Manda Rosa Yanti untuk menggunakan data hasil tes wawancara untuk mendukung proses penelitian skripsi mahasiswa yang bersangkutan. Prosedur penelitian ini tidak akan memberikan dampak dan resiko apapun pada informan. Kerahasiaan jawaban atau informasi yang saya berikan dijamin sepenuhnya oleh peneliti.

Jember, 16 April2025

Informan



(Ahmad Yasin)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Handoko
 Alamat : Jl. Manggar IX/36 Gebang Jember
 Usia : 36 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki - Laki

Menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi menjadi subjek dalam kegiatan penelitian tugas akhir (skripsi) yang berjudul "Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas Dan Center Advokasi (Perpenca) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember" dengan dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saya memberikan izin kepada sdr Manda Rosa Yanti untuk menggunakan data hasil tes wawancara untuk mendukung proses penelitian skripsi mahasiswa yang bersangkutan. Prosedur penelitian ini tidak akan memberikan dampak dan resiko apapun pada informan. Kerahasiaan jawaban atau informasi yang saya berikan dijamin sepenuhnya oleh peneliti.

Jember, 16 April2025

Informan



(ARI HANDOKO.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

J. Dokumentasi



(Wawancara Bersama Ketua Perpenca Jember)



(Wawancara Bersama Pendiri Perpenca Jember)



(Wawancara Bersama Anggota Perpenca Jember)



(Wawancara Bersama Anggota Perpenca Jember)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(Dokumentasi Kegiatan Arisan Rutin Perpenca)

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Manda Rosa Yanti
NIM : 211103030009
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Juni 2003
Alamat : Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo-Jember
Telp/HP : 085708750482
Email : manrosyan.26@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- a. TK Al Hidayah V
- b. SDN Sanenrejo 02
- c. SMPN 2 Tempurejo
- d. SMA Negeri Ambulu
- e. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember:
 - a. Fakultas/Prodi : Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam
 - b. Angkatan : 2021
 - c. NIM : 211103030009